

PSIKOLOGI POLITIK

Editor:

Whinda Yustisia
Moh. Abdul Hakim
Rahkman Ardi



Daftar Isi

PSIKOLOGI POLITIK

Editor:

Whinda Yustisia

Moh. Abdul Hakim

Rahkman Ardi



PSIKOLOGI POLITIK

Copyright© 2021,Whinda Yustisia, dkk.

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

oleh Penerbit Buku Kompas, 2021

PT Kompas Media Nusantara

Jl. Palmerah Selatan 26-28

Jakarta 10270

e-mail: buku@kompas.com

Editor:

- Whinda Yustisia
- Moh. Abdul Hakim
- Rahkman Ardi

Desain Sampul: A Novi Rahmawanta

Ilustrasi sampul diolah berdasarkan foto: Kompas/Yuniadhi Agung

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xvi + 600 (616 hlm.); 15 cm x 23 cm

ISBN 978-623-241-639-0

ISBN 978-623-241-640-6 (PDF)

KMN 582012327

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar Editor 	
Whinda Yustisia, Moh. Abdul Hakim, Rahkman Ardi.....	ix
Kata Pengantar Prof. Hamdi Muluk	xi
Bab 1	
Pengantar Psikologi Politik Whinda Yustisia.....	1
Bab 2	
Metode Penelitian Dalam Psikologi	
Politik Rizqy Amelia Zein.....	33
Bab 3	
Kognisi, Afek, Dan Emosi Politik Whinda Yustisia	
dan Naufal Umam	75
Bab 4	
Identitas Sosial dan Perilaku Politik Susilo Wibisono	113
Bab 5	
Kepribadian dan Perilaku Politik Bagus Takwin	145
Bab 6	
Ideologi dan Perilaku Politik Joevarian Hudiyana	195
Bab 7	
Perilaku Memilih Rizka Halida dan Moh. Abdul Hakim.....	243

Bab 8	Kepemimpinan Politik Transformatif dan Kolaboratif Indro Adinugroho.....	279
Bab 9	Media dan Perilaku Politik Rahkman Ardi.....	315
Bab 10	Politisasi Prasangka dan Politisasi Kebencian Antarkelompok Idhamsyah Eka Putra dan Yuni Nurhamida.....	359
Bab 11	Aksi Kolektif Muhammad Abdan Shadiqi.....	395
Bab 12	Gerakan Separatisme dan Usaha Rekonsiliasi Ali Mashuri.....	437
Bab 13	Psikologi Korupsi dalam Perspektif Psikologi Politik Zainal Abidin dan Yuliana Hanami.....	493
Bab 14	Psikologi Terorisme: Motivasi, Kelompok, dan Ideologi Mirra Noor Milla.....	523
	Indeks	563
	Tentang Penulis	593

Metode Penelitian dalam Psikologi Politik

Rizqy Amelia Zein

Pengantar

Meskipun hitung cepat (*quick count*) mayoritas lembaga survei menunjukkan bahwa dirinya kalah kontestasi, Prabowo Subianto, calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, buru-buru mengumumkan kemenangannya di depan awak media beberapa jam setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. Berbekal temuan hitung cepat dan *exit poll* dari beberapa lembaga survei sekaligus perhitungan riil (*real count*) yang dilakukan oleh relawannya, Prabowo mengklaim bahwa ia meraup suara dengan margin yang sangat besar. Meskipun temuan lembaga survei yang dirujuk Prabowo bertolak belakang dengan kebanyakan lembaga survei, termasuk perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo dan pendukungnya amat memercayai temuan lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan dengan lantang menuduh lembaga survei yang berbeda dengan klaimnya merupakan lembaga bayaran, tidak saintifik, dan partisan.

Dari kasus di atas tentu menarik untuk membahas pertanyaan-pertanyaan seperti; bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk membedakan informasi yang saintifik, sains semu (*pseudoscience*), mis/disinformasi, mitos, dan intuisi? Bagaimana sesungguhnya cara kerja ilmuwan dalam menghasilkan temuan yang saintifik? Dan bagaimana seharusnya temuan penelitian dilaporkan dan disebarluaskan?

Strategi Pemeriksaan Kredibilitas Temuan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan peneliti untuk mengevaluasi informasi dalam literatur secara kritis. *Yang pertama* adalah berulang

kali mengajukan pertanyaan dan menghindari sikap 'menerima segala hal begitu saja' (*taken everything for granted*). Proses ini amat sulit pada awalnya dan membutuhkan latihan yang intensif. Namun, yang perlu diingat, kemampuan ini amat sentral peranannya apabila kita ingin mendekati realitas yang ingin kita pahami.

Yang kedua, mengevaluasi semua bukti termasuk yang bertentangan dengan asumsi yang diyakini, untuk memahami 'gambar besar' dari fenomena yang sedang diselami. Ketika menarik kesimpulan, ilmuwan wajib mempertimbangkan seluruh bukti, bukan hanya yang sesuai dengan asumsi atau keinginannya saja. Melakukan yang terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya bias konfirmasi, di mana peneliti hanya percaya pada bukti-bukti yang sesuai dengan keinginannya saja. Apabila hal ini terjadi, maka sangat mungkin peneliti mendapatkan impresi yang keliru soal fenomena yang sedang ia pelajari.

Yang ketiga, ketika membaca hasil penelitian, cari tahu apakah studi tersebut dilandasi oleh teori yang jelas dan diikuti dengan prediksi yang jelas juga. Prediksi biasanya berbentuk hipotesis statistik yang spesifik, misalnya; ada korelasi yang positif/negatif antarvariabel penelitian, ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan yang diberi perlakuan, dsb. Namun, yang perlu dicatat, hipotesis statistik tidak secara langsung mencerminkan substansi dari teori, meskipun hipotesis tersebut diperoleh atau diturunkan dari teori (Dienes, 2008).

Yang keempat, untuk melakukan pengujian apakah suatu teori sah atau tidak, maka dibutuhkan hipotesis *auxilliary* berupa prediksi statistik yang langsung dapat diujikan pada data. Misalnya, ketika Anda ingin menguji kesahihan *dual-process motivational model of prejudice* (Duckitt, 2001) yang umum digunakan untuk menjelaskan munculnya prasangka pada kelompok sosial tertentu, maka Anda perlu membuat hipotesis *auxilliary*, misalnya "*individu yang mempersepsikan dunia sebagai tempat yang berbahaya akan cenderung menyukai pemimpin yang otoriter*". Dengan menggunakan hipotesis *auxilliary*, prediksi akan lebih mudah diuji dengan proses falsifikasi (*falsifiable*).

Selain dapat difalsifikasi, teori atau prediksi harus dicari korespondensinya dengan realitas (data) melalui pengujian secara ketat. Pengujian ketat (*severe testing*) diperlukan untuk menyimpulkan apakah teori atau prediksi bertahan (*corroborated*) atau gagal dipertahankan (*falsified*). Sebuah pengujian dikatakan ketat (*severe*) apabila berdasarkan teori yang sedang diuji, kondisi yang diprediksikan sangat mungkin terjadi, tetapi kecil kemungkinannya terjadi berdasarkan semua teori lain yang tidak diuji (*the rest of background knowledge*) (Dienes, 2008). Berikut adalah ilustrasi konkretnya.

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah minum wedang jahe dapat meredakan masuk angin. Maka, peneliti tersebut melakukan pengujian pada dua kelompok yang sama-sama menderita masuk angin, di mana satu kelompok diberikan segelas wedang jahe (kelompok perlakuan), sedangkan sisanya diberi minum air putih hangat (kelompok kontrol). Apabila kelompok yang diberi wedang jahe menunjukkan intensitas gejala masuk angin yang lebih rendah daripada kelompok kontrol, maka peneliti boleh menarik kesimpulan bahwa wedang jahe mungkin efektif mengobati masuk angin.

Akan tetapi, prediksi ini juga dapat terjadi apabila kelompok perlakuan memiliki tingkat kekebalan tubuh yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Oleh karena itu, penurunan gejala masuk angin dapat terjadi pada dua kondisi; (a) ketika minum wedang jahe; dan (b) ketika tingkat kekebalan tubuh tinggi. Kondisi ini adalah sesuatu yang *tidak diinginkan oleh peneliti*, karena pengujian ketat seharusnya mengasumsikan bahwa prediksi terjadi secara spesifik pada satu kondisi (teori yang sedang diuji) dan seharusnya tidak terjadi dalam kondisi (teori) yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut, teori bahwa wedang jahe mengobati masuk angin tidak dapat difalsifikasi karena kita akan selalu mendapati hasil yang sama (penurunan gejala masuk angin) terlepas apakah prediksi tersebut (minum wedang jahe mengobati masuk angin) benar atau salah.

Dalam paradigma kuantitatif, utamanya yang menggunakan pendekatan Neyman-Pearson (Dienes, 2008; Perezgonzalez, 2015), pengujian ketat hanya mungkin dilakukan apabila peneliti memiliki peluang yang besar untuk mendeteksi bukti yang mendukung teori, apabila bukti tersebut benar-benar ada. Misalnya, ketika peneliti ingin tahu apakah minum wedang jahe benar-benar mengobati masuk angin, maka peneliti harus memiliki peluang yang besar untuk mendeteksi adanya perbedaan intensitas gejala masuk angin antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, kalau perbedaan tersebut benar-benar ada. Peluang untuk mendeteksi adanya efek (apabila efek tersebut benar-benar ada) dikenal sebagai *statistical power*, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Ragam Desain Penelitian dalam Studi-Studi Psikologi Politik

Apabila menganalogikan kegiatan meneliti dengan memasak, maka memilih desain penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian seperti memilih alat yang digunakan untuk memasak. Untuk memilih alat masak yang tepat, maka kita harus benar-benar memahami apa yang ingin kita masak. Serta untuk memastikan bahwa masakan dapat dihidangkan sebagaimana mestinya, maka kita harus mengikuti tahapan memasak yang

tepat. Melewati beberapa langkah atau tidak melakukan tahapan memasak dengan berurutan akan berdampak pada kualitas masakan.

Paralel dengan kegiatan meneliti, bahwa peneliti harus benar-benar memahami apa yang ia hendak cari dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang tepat. Agar temuan penelitian kredibel, maka peneliti perlu memilih desain yang paling sesuai dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang ia ajukan. Terakhir, apabila peneliti menginginkan temuan yang meyakinkan, maka ia perlu cermat dalam mengikuti tahapan atau prosedur yang sistematis dalam melakukan penelitian.

Di bagian ini, penulis akan menguraikan secara singkat beragam desain penelitian yang lazim digunakan dalam studi psikologi politik.

Survei

Bayangkan ada sebuah ceret yang berisi kopi di hadapan Anda saat ini. Untuk mengetahui rasa kopi, apakah Anda harus meminum seluruh kopi yang ada di dalam ceret tersebut? Kalau dengan mencicip sedikit saja sudah cukup, seberapa banyak kopi yang harus diminum agar dapat menyimpulkan rasanya dengan akurat?

Logika dan persoalan yang sama juga dihadapi oleh peneliti psikologi politik yang menggunakan desain survei. Prinsipnya, untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai sekelompok orang, kita tidak perlu melakukan pengujian pada seluruh anggota kelompok (sensus), tetapi cukup dengan melakukan pengujian pada beberapa orang yang mewakili kelompok tersebut (survei).

Penelitian survei umumnya dapat berupa survei *cross-sectional*, yaitu ketika peneliti melakukan pengambilan data pada satu kelompok sampel dalam satu waktu. Survei juga dapat dilakukan dengan desain longitudinal (*time series* atau *panel study*), yaitu ketika peneliti melakukan pengambilan data secara berulang pada kelompok sampel yang sama dalam periode waktu tertentu.

Data yang diperoleh dari penelitian survei memiliki kegunaan praktis yang luas, bahkan melampaui tujuan akademik. Hasil survei dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan lainnya di berbagai konteks. Survei skala besar seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, atau Indonesian Family Life Survey (IFLS) oleh RAND, menyediakan data yang amat kaya dan memberikan

banyak informasi penting yang dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan di berbagai sektor.

Penelitian survei merupakan desain yang amat efisien dan paling luas diaplikasikan pada penelitian sosial dan perilaku, termasuk dalam studi psikologi politik. Penelitian survei dapat dilakukan untuk kepentingan akademik dan juga lazim digunakan untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai kandidat yang akan mereka pilih di pemilihan umum. Di bagian ini, penulis akan lebih banyak menjelaskan mengenai survei dalam konteks studi akademik, meskipun di bagian akhir tersedia sedikit ulasan mengenai survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga survei non-pemerintah (*pollster*), utamanya yang menjadi bagian penting dari proses politik elektoral.

Populasi dan Sampel

Survei merupakan desain penelitian yang tak hanya dapat digunakan untuk membuat profil yang mendeskripsikan sekelompok orang, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji teori atau prediksi. Namun, sering kali peneliti memiliki sumber daya yang terbatas sehingga tidak mungkin melibatkan seluruh anggota populasi (*sensus*) dalam pengambilan data. Yang juga sering terjadi adalah ukuran populasi tidak diketahui sehingga peneliti harus memilih sebagian kecil responden yang dapat mewakili populasi yang ingin diteliti. Tidak hanya itu, kualitas data yang diperoleh melalui proses *sampling* justru lebih baik daripada data *sensus* (Fowler, 2014). Proses pemilihan responden ini disebut dengan teknik *sampling*. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui agar dapat melakukan proses pemilihan sampel dengan baik. Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelum studi dilakukan. Populasi juga mencerminkan konteks yang ingin diteliti dan merupakan bagian penting dari studi yang dilakukan. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk mendefinisikan populasi penelitiannya disebut juga kriteria inklusi. Populasi biasanya disimbolkan dengan N dan harus didefinisikan secara eksplisit, hati-hati, dan menyeluruh dengan memperhatikan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab (Ruel, Wagner, & Gillespie, 2016).

Mendefinisikan populasi tidak semudah kelihatannya. Selain menentukan kriteria inklusi, peneliti juga perlu menerapkan kriteria eksklusi yang kemudian menghasilkan populasi target. Kriteria eksklusi adalah karakteristik yang mengecualikan individu tertentu dari proses pemilihan sampel. Pengecualian ini biasanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya, apabila seorang peneliti ingin melakukan penelitian pada Warga Negara Indonesia (WNI), kadang-

kadang peneliti harus mengecualikan WNI yang tinggal di luar negeri karena sumber daya yang dimiliki peneliti tidak cukup untuk melibatkan WNI yang tinggal di luar negeri.

Sampel adalah subset atau bagian kecil dari populasi, yang biasanya disimbolkan dengan n . Elemen sampel dapat berbentuk unit analisis yang beragam, mulai dari individu, kelompok (perusahaan, ormas, universitas, dll.), objek, tempat (RT, RW, kabupaten/kota, provinsi, desa, dll.), atau kejadian yang menarik untuk diteliti. Apabila populasi penelitian terdiri dari sekumpulan individu, maka sampel juga terdiri dari individu-individu. Untuk menentukan anggota populasi yang menjadi sampel, peneliti perlu menjamin bahwa sampel tersebut benar-benar representatif mewakili populasi. Apabila sampel yang dipilih representatif mewakili populasi, maka temuan penelitian yang diperoleh dari proses *sampling* dapat digeneralisasi pada populasi yang diwakilinya. Untuk menjamin generalisasi, peneliti perlu memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Pendekatan ini disebut juga sebagai *probability sampling*.

Untuk melakukan *probability sampling*, maka peneliti harus memiliki *sampling frame*, yaitu daftar yang memuat seluruh anggota populasi. Apabila peneliti tertarik melakukan studi dengan populasi WNI, maka untuk melakukan *probability sampling* peneliti harus memiliki data kependudukan yang memuat informasi mengenai seluruh individu dengan status kependudukan WNI. Salah satu kesalahan yang umum terjadi dalam membuat *sampling frame* adalah *coverage error*, yaitu situasi di mana tidak semua anggota populasi tercantum dalam *sampling frame*.

Coverage error dapat menimbulkan bias, yaitu perbedaan sistematis antara kondisi sesungguhnya dari suatu populasi dengan kondisi yang diprediksikan melalui analisis pada kelompok sampel (Ruel, dkk., 2016). Dengan melakukan *probability sampling*, peneliti punya peluang lebih besar untuk mendapatkan kelompok sampel yang lebih bervariasi. Ingat, variasi (varian) adalah hal yang amat krusial dalam generalisasi. Semakin besar variabilitas kelompok sampel, maka semakin akurat prediksi atau kesimpulan yang ditarik oleh peneliti (Fowler, 2014).

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan *probability sampling*, yaitu: *simple random sampling* yang juga dikenal dengan *equal probability sample* yang mengasumsikan bahwa seluruh anggota populasi punya peluang yang sama persis untuk terpilih menjadi sampel melalui prosedur pengacakan yang sama. Seandainya Anda ingin mengambil sampel dari populasi yang beranggotakan 1000 orang, maka peluang satu orang untuk terpilih menjadi sampel adalah setara, yaitu 1/1000. *Simple random sampling* dapat dilakukan dengan misalnya

menggunakan *random number generator*. Google juga memiliki layanan ini dan dapat diakses dengan mengetikkan "*random number generator*" pada kolom pencarian. Meskipun kelihatannya ideal, *simple random sampling* justru menghasilkan variasi sampel yang amat kecil dan akibatnya kualitas sampel menjadi buruk, terutama apabila peneliti melibatkan populasi yang memiliki struktur di dalamnya.

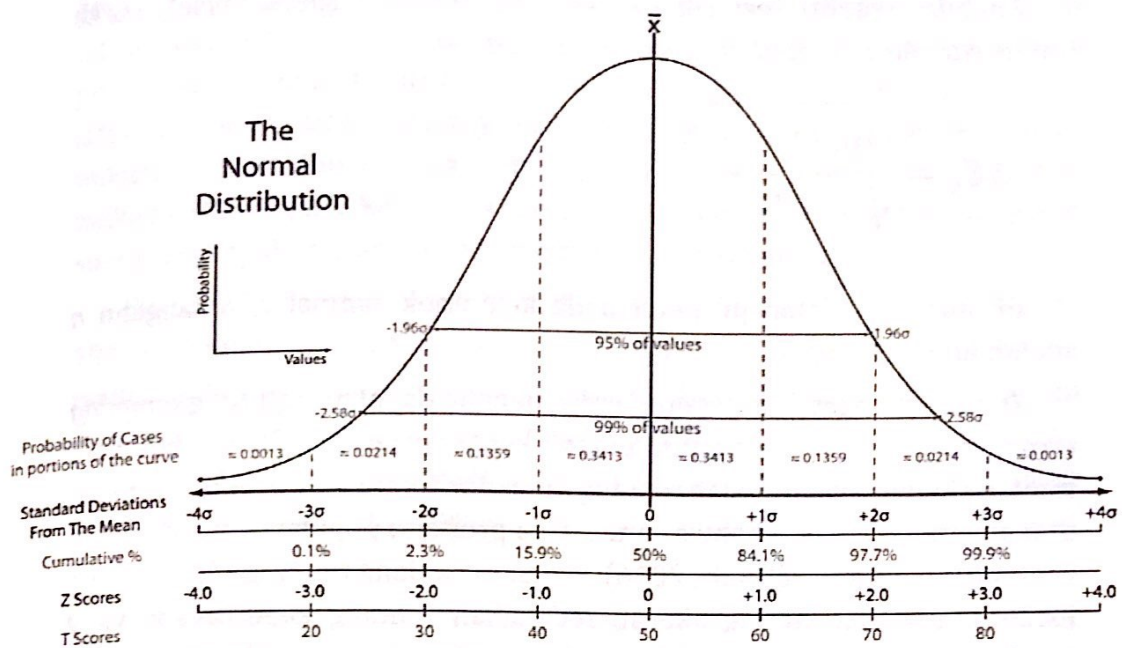
Selanjutnya adalah *systematic random sampling*, yaitu teknik *sampling* yang pengambilan sampelnya mengikuti interval waktu atau jumlah tertentu. Misalnya, seorang petugas kendali mutu melakukan pemeriksaan kualitas produk dengan mengambil sampel sebanyak 1 produk untuk setiap 1000 produk yang diproduksi. Atau, seorang peneliti psikologi politik yang mengambil sampel sebanyak 10 responden untuk setiap 100.000 penduduk. Namun, perlu diingat, pengambilan sampel dengan interval tertentu menimbulkan masalah *periodicity* yang merupakan penyebab timbulnya bias karena akan menghasilkan kelompok sampel dengan variabilitas yang rendah, terutama apabila populasi memiliki struktur di dalamnya. Kedua teknik *probability sampling* yang telah dijelaskan sebelumnya tidak cocok diterapkan apabila peneliti menginginkan sampel yang representatif dari populasi yang memiliki struktur. Misalnya, apabila peneliti ingin melakukan studi pada Kelurahan A yang profil demografinya beragam, maka peneliti menginginkan perwakilan sub-populasi (misalnya gender, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan) dicakup dalam kelompok sampelnya. Dengan kedua teknik *sampling* yang dijelaskan sebelumnya, sangat mungkin sampel yang ditarik justru tidak proporsional karena mengabaikan struktur yang ada di populasi.

Alternatifnya, peneliti dapat menggunakan: *cluster random sampling*, *stratified random sampling*, atau *multistage cluster sampling*. *Cluster sampling* berarti peneliti membuat *sampling frame* terpisah untuk masing-masing kategori non-strata pada populasi, misalnya sekolah, kelurahan, desa, RT, gender, dsb., lalu mengacak dan menentukan sampel di masing-masing kategori tersebut. Implikasinya, setiap kategori memiliki perwakilan dalam kelompok sampel. *Stratified sampling* adalah strategi yang sama, tetapi kategori yang digunakan untuk menentukan sampel adalah kategori dengan strata atau berjenjang, misalnya: tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dsb. Sedangkan yang terakhir, *multistage cluster sampling* atau *multilevel cluster sampling* menggunakan strategi yang lebih kompleks, yaitu mengambil sampel secara acak dari kategori yang berlapis. Pendekatan yang terakhir menghasilkan kualitas sampel yang terbaik (dengan variabilitas yang lebih besar), utamanya ketika peneliti tidak memiliki *sampling frame*.

Seorang peneliti psikologi politik tertarik untuk meneliti tingkat partisipasi politik pada pemilih pemula dengan kriteria: remaja yang berusia 18-23 tahun dan mahasiswa aktif pada jenjang S-1. Agar mendapatkan sampel yang representatif, peneliti melakukan *multistage cluster sampling* dengan tahapan sebagai berikut: (a) menentukan secara acak sejumlah provinsi yang menjadi sampel dari 34 provinsi di Indonesia; (b) menentukan secara acak sejumlah perguruan tinggi yang menjadi sampel di masing-masing provinsi yang terpilih menjadi sampel pada tahap (a); (c) menentukan secara acak sejumlah program studi S-1 pada masing-masing perguruan tinggi yang sudah terpilih menjadi sampel pada tahap (b); dan (d) menentukan secara acak sejumlah responden penelitian di masing-masing program studi S-1 yang sudah terpilih pada tahap (c).

Problem *sampling* berikutnya berkaitan dengan jumlah sampel. Pertanyaan yang sering diajukan adalah berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil oleh peneliti agar generalisasinya akurat? Meskipun kelihatannya sederhana, persoalan ini tidak mudah diatasi dan sangat bergantung pada tujuan survei. Apabila tujuan survei adalah membuat profil atau deskripsi, maka akurasi penarikan kesimpulan bergantung pada kadar *sampling error* (atau yang juga dikenal sebagai *margin error*). Namun, ketika peneliti melakukan survei dengan tujuan menguji teori, hipotesis, atau prediksi, maka selain *sampling error*, peneliti harus memperhatikan *statistical power*, ukuran efek (*effect size*) yang ingin dideteksi, dan desain penelitian yang digunakan.

Sampling error merupakan selisih antara rerata (*mean*) atau proporsi pada sampel dengan yang sebenarnya terjadi di populasi. Ingat, peneliti tak mungkin tahu apa yang terjadi di populasi sehingga yang dapat dilakukan adalah memperkirakan seberapa jauh menyimpang estimasi yang disimpulkan peneliti dengan mengamati kelompok sampel dengan yang terjadi sebenarnya di populasi. Dalam statistik dikenal *central limit theorem* yang menyatakan apabila jumlah kelompok sampel (n) mendekati tak terhingga (∞) maka distribusi rerata dari kelompok sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal (*gaussian distribution*), meskipun apabila distribusi data di populasi tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, *the law of large numbers* menyebutkan apabila $n = \infty$, maka rerata sampel sama dengan rerata populasi.



Gambar1. Distribusi normal

(Sumber: <https://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/t-score.html>)

Distribusi normal merupakan distribusi yang bentuk kurvanya secara visual mirip seperti lonceng, di mana mayoritas anggota kelompok sampel berada di tengah-tengah kurva (lihat gambar 1). Apabila distribusi sampel mengikuti distribusi normal, maka 68% dari jumlah total kelompok sampel akan jatuh pada rentang 1 standar deviasi masing-masing di kiri dan kanan rerata sampel, sedangkan 95% dari seluruh kelompok sampel akan jatuh pada rentang 1.96 standar deviasi masing-masing di kiri dan kanan rerata sampel. Karena tidak mungkin mengetahui standar deviasi populasi, maka yang dapat kita lakukan adalah menghitung *standard error*, yaitu parameter statistik yang menunjukkan akurasi distribusi sampel dalam merepresentasikan populasi, dengan menggunakan standar deviasi kelompok sampel (Ruel, dkk., 2016).

Rumus *standard error of mean* (SE_{μ}) adalah...

$$SE_{\mu} = \frac{S_y}{\sqrt{n}}$$

di mana S_y adalah standar deviasi pada kelompok sampel y dan n adalah jumlah sampel.

Apabila peneliti tertarik menghitung proporsi (persentase), maka rumus *standard error of proportion* (SE_p) adalah...

$$SE_p = \sqrt{\frac{p_y(1 - p_y)}{n}}$$

di mana p_y adalah proporsi pada kelompok sampel y , sedangkan n adalah jumlah sampel.

Dengan mengetahui *standard error*, peneliti dapat menghitung *sampling error* (*margin error*) sekaligus rentang kepercayaan (*confidence interval*). Rentang kepercayaan adalah rentang di sekitar rerata atau proporsi sampel, di mana peneliti yakin bahwa rerata atau proporsi populasi jatuh di dalam rentang tersebut (Ruel, dkk., 2016). Semakin panjang rentang kepercayaan, estimasi menjadi kurang akurat, sedangkan rentang kepercayaan yang cenderung pendek menunjukkan bahwa estimasi pada kelompok sampel semakin dekat dengan nilai sesungguhnya di populasi.

Untuk memperoleh *sampling error*, kita tinggal mengalikan *standard error* dengan nilai kritis z , yaitu nilai yang berkaitan seberapa luas area kurva normal yang ingin diestimasi oleh peneliti. Nilai kritis z tergantung pada taraf kepercayaan (α) yang ditetapkan peneliti sebelum mengambil data. Apabila peneliti menetapkan $\alpha=95\%$, maka nilai $z = 1.96$, sehingga *sampling error* (E)...

$$E = 1.96 \cdot SE$$

Sedangkan untuk menghitung rentang kepercayaan (pada taraf kepercayaan 95%) adalah $\bar{y} \pm E$.

Ilustrasi 1: Seorang peneliti psikologi politik melakukan survei pada 1000 responden di kota Lumajang dan menyimpulkan bahwa 32% responden menyatakan akan memilih Ibu Paulina sebagai wali kota, lalu 34% responden menyatakan mendukung Bapak Fernando Jose pada pemilihan umum bulan depan. Sedangkan sisanya tidak bersedia menjawab, tidak tahu, dan belum memutuskan. Berdasarkan informasi tersebut, maka SE_p dapat diketahui sebesar 0.014. Apabila peneliti tersebut menetapkan taraf kepercayaan (α) sebesar 95%, maka *sampling error* (E) adalah $1.96 \cdot 0.014 = 0.028$ atau 2.8 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan peneliti tersebut yakin (dengan peluang sebesar 95%) bahwa dukungan warga Lumajang pada Ibu Paulina berkisar antara 29.2-34.8% ($32\% \pm 2.8\%$) dan dukungan pada Bapak Fernando Jose berkisar antara 31.2-

36.2 persen ($34\% \pm 2.8\%$). Namun, karena taraf kepercayaan yang ditetapkan sebesar 95%, maka masih ada peluang sebesar 5% bahwa persentase dukungan warga kota Lumajang pada masing-masing kandidat, jatuh di luar rentang kepercayaan tersebut. Karena rentang kepercayaan dukungan pada Ibu Paulina dan Bapak Fernando Jose tumpang tindih, maka meskipun pada kelompok sampel Bapak Fernando Jose mendapatkan suara terbanyak, belum tentu ia memenangkan pemilihan umum.

Ilustrasi 2: Seorang peneliti psikologi politik melakukan survei pada 100 responden di kota Magetan untuk mengetahui berapa kali responden melihat iklan calon legislatif dalam sehari. Apabila responden penelitian rata-rata melihat iklan calon legislatif sebanyak 12 kali dalam sehari dengan standar deviasi sebesar 8 kali, maka $SE\mu=0.8$. Apabila ditetapkan sebesar 95%, maka E sebesar $1.96*0.8=1.56$ kali (dibulatkan ke atas menjadi 2 kali).

Dari informasi tersebut, umumnya (dengan peluang sebesar 95%) warga kota Magetan rata-rata melihat iklan calon legislatif antara 10-14 (10 ± 2) kali dalam sehari. Namun, karena α ditetapkan sebesar 95%, maka masih ada peluang sebesar 5% rerata intensitas warga Magetan melihat iklan calon legislatif dalam sehari, jatuh di luar rentang tersebut.

Apabila memperhatikan kembali formula *standard error* dan *sampling error* kita dapat menyimpulkan bahwa estimasi survei akan semakin akurat ketika sampel memiliki variasi yang rendah (ditunjukkan oleh standar deviasi yang kecil) dan ketika peneliti mengambil sampel dalam jumlah besar. Yang menarik, ukuran populasi tidak berkaitan dengan akurasi sehingga bertentangan dengan yang banyak dipercayai oleh orang awam, $n = 1000$ akan menghasilkan tingkat akurasi yang sama besarnya berapa pun ukuran populasi yang diwakilinya.

Ketika melakukan teknik *probability sampling*, peneliti juga harus mempertimbangkan taraf respons (*response rate*). Seandainya peneliti mengundang 1000 orang yang terpilih menjadi sampel dan hanya 100 orang yang bersedia dan menyelesaikan partisipasi, artinya taraf respons hanya sekitar 10% saja. Padahal, apabila taraf respons kurang dari 70 persen, maka sangat besar kemungkinannya bahwa banyaknya partisipan yang tidak merespons tidak terjadi secara kebetulan (*random*) sehingga sangat mungkin terjadi bias (Ruel, dkk., 2016). *Nonresponse error* merupakan sumber kesalahan yang langsung berdampak pada kualitas temuan penelitian survei sehingga apabila taraf respons rendah, maka kualitas data yang didapatkan menjadi kurang baik.

Menentukan sampel dengan teknik *probability sampling* adalah strategi yang ideal, tetapi yang lebih sering terjadi, peneliti menghadapi kondisi di mana *probability sampling* tidak dapat dilakukan. Kendala yang paling

umum adalah peneliti tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat *sampling frame* sehingga peluang terpilihnya satu unit sampel tidak dapat diketahui. Bisa juga kondisi ini terjadi ketika penelitian survei melibatkan populasi dengan kriteria yang sangat spesifik sehingga sulit diakses. Dalam kondisi ini, peneliti dapat menggunakan *non-probability sampling* di mana sampel ditarik tanpa proses pengacakan. Implikasinya memang tidak menyenangkan, bias dan *sampling error* tidak dapat diestimasi sehingga generalisasi sulit sekali dilakukan (Fowler, 2014).

Beberapa teknik *non-probability sampling* yang umumnya dilakukan (Ruel, dkk., 2016) adalah; *convenience sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan akses. Contohnya ketika peneliti merekrut keluarga, teman, kolega, dan kenalan lainnya sebagai responden survei. Strategi ini tentu berisiko membiarkan subjektivitas peneliti mengontaminasi keputusan pemilihan sampel (*selection bias*). Selanjutnya adalah *quota sampling*, yaitu *convenience sampling* yang ditambah batasan jumlah (kuota) pada kategori demografis tertentu (misalnya, 50% laki-laki dan sisanya perempuan).

Berikutnya adalah *purposive* atau *judgemental sampling*, yang merupakan salah satu bentuk *convenience sampling*. Teknik ini digunakan ketika sampel dipilih berdasarkan pengetahuan mereka yang spesifik, yang berkaitan dengan topik penelitian. Terminologi lain untuk teknik ini adalah *key informant interview*, yaitu ketika hanya informan yang dianggap menguasai isu yang sedang diteliti, yang dicakup sebagai sampel. Teknik *purposive sampling* cocok digunakan ketika meneliti komunitas marjinal karena umumnya *sampling frame* pada komunitas marjinal (misalnya, anak jalanan, pekerja sosial, aktivis LSM, dsb.) tidak tersedia dan tidak terkonsentrasi pada satu area tertentu.

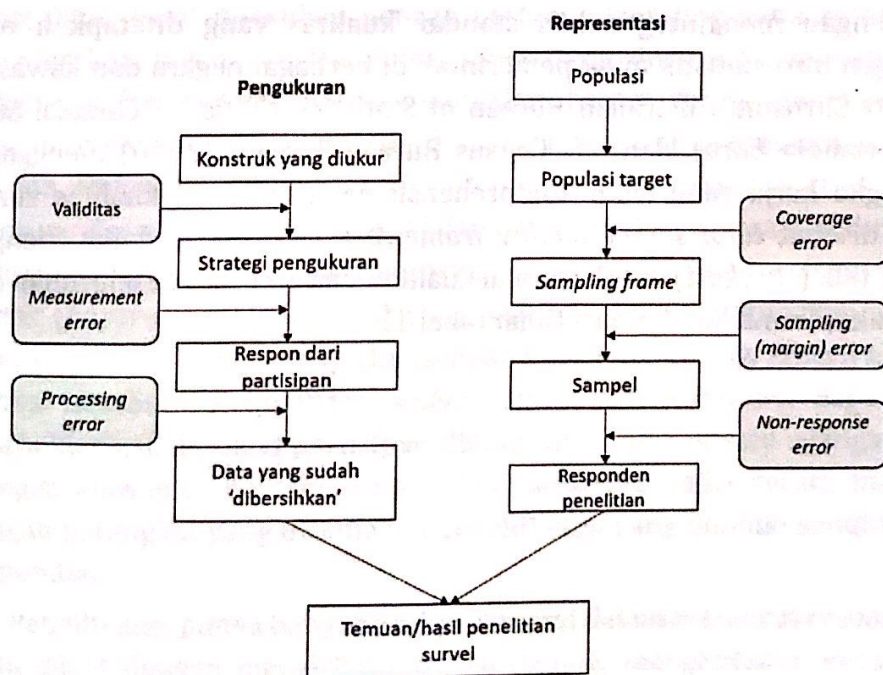
Yang terakhir, *snowball sampling* atau yang juga dikenal sebagai *chain referral* atau *chain sampling*, yaitu strategi rekrutmen responden dengan cara meminta responden penelitian untuk merekomendasikan atau merujuk calon responden lainnya yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini sangat cocok apabila peneliti menghadapi populasi yang sulit diakses, lebih kecil cakupannya dari populasi umum, dan umumnya berada di lokasi yang saling berjauhan.

Menilai Kualitas Temuan Penelitian Survei

Di banyak laporan penelitian survei, *sampling error* (atau *margin error*) dilaporkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bahwa seolah-olah *sampling error* adalah satu-satunya indikator yang mencerminkan kualitas survei secara keseluruhan. Padahal faktanya, sumber kesalahan

(*source of error*) lainnya justru lebih penting untuk dikendalikan, terutama pada survei yang melibatkan jumlah sampel atau populasi target yang besar. Selain itu, tidak jarang peneliti melaporkan *sampling error*, padahal peneliti tidak mempertimbangkan struktur populasi ketika proses pengacakan, atau bahkan ketika ia tidak melakukan *probability sampling* sama sekali. Padahal, tidak mungkin *sampling error* dapat dihitung ketika peneliti tidak melakukan *probability sampling* sehingga dalam situasi seperti ini, memberikan informasi mengenai *sampling error* tentu akan memberikan impresi yang keliru mengenai proses penelitian.

Banyak peneliti survei sepakat perlu adanya kerangka kerja yang lebih luas untuk menilai kualitas survei sehingga paradigma *total survey error* (TSE) digagas sebagai kerangka kerja yang dapat membantu peneliti memperkirakan kualitas temuan penelitian survei. TSE pada dasarnya adalah akumulasi seluruh sumber kesalahan (yang menyebabkan ketidaktepatan estimasi) yang melekat pada desain, pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data penelitian survei (Biemer, 2010; Groves & Lyberg, 2010). Dalam konteks ini, *error* merujuk pada penyimpangan (atau selisih) antara estimasi pada kelompok sampel dengan nilai parameter yang sesungguhnya di populasi. TSE mencakup beberapa sumber kesalahan yang semuanya memiliki dampak langsung dalam menentukan kualitas temuan penelitian survei.



Gambar2. Total Survey Error, diadopsi dari Groves dan Lyberg (2010).

TSE pada dasarnya mencakup semua kemungkinan kesalahan yang muncul dari proses penelitian survei yang tidak hanya melibatkan *sampling error* saja. TSE mencakup semua kemungkinan kesalahan yang terjadi pada dua proses utama dalam survei, yaitu penarikan sampel dan pengukuran konstruk yang diteliti (Groves & Lyberg, 2010). Beberapa di antaranya (*validitas, measurement error/reliabilitas, coverage error, dan nonresponse error*) telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Sedangkan *processing error* merupakan kesalahan yang mungkin terjadi ketika proses *input data* (apabila menggunakan survei dengan administrasi *paper-based*), pembersihan (*data cleaning*), pembobotan (*weighting*), pengorganisasian dan transformasi data (*data wrangling*).

Meskipun TSE telah mencakup lebih banyak aspek yang memengaruhi akurasi temuan survei, banyak peneliti belum puas dan menyebutnya terlalu sederhana karena mengabaikan aspek kualitas dari kacamata pengguna survei. Apalagi pengguna survei biasanya tidak terlalu memperhatikan, bahkan menerima begitu saja, aspek akurasi ini (Biemer, 2010). Dalam menilai kegunaan dan kualitas temuan survei pengguna lebih memprioritaskan ketepatan waktu, aksesibilitas, kegunaan data, dan desain instrumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab (Biemer, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas survei merupakan konsep yang kompleks, multidimensional, dan lebih komprehensif melampaui cakupan TSE.

Dengan mengintegrasikan standar kualitas yang ditetapkan oleh berbagai biro statistik milik pemerintah di berbagai negara dan kawasan, seperti Eurostat, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, Stats NZ (Selandia Baru), dan U.S. Census Bureau, Biemer (2010) menggagas kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas survei yang disebut *total survey quality framework* (SQF). SQF dapat menjadi daftar tilik (*checklist*) untuk menilai kualitas survei secara keseluruhan dan mencakup sembilan dimensi (lihat tabel 1).

Tabel 1. Dimensi *Survey Quality Framework* (Biemer, 2010)

Dimensi	Deskripsi
Akurasi	<i>Total survey error</i> diminimalisasi
Kredibilitas	Temuan survei dianggap terpercaya atau kredibel oleh komunitas profesional
Komparabilitas	Perbandingan temuan survei pada kategori demografis, spasial, dan temporal yang berbeda tepat dan meyakinkan (<i>robust</i>)
Kegunaan/Kemudahan interpretasi data	Dokumentasi dan metadata disimpan dengan baik dan mudah digunakan
Relevansi	Data/temuan hasil survei sesuai dengan kebutuhan pengguna
Aksesibilitas	Akses pada data mentah tersedia dan mudah diakses
Ketepatan waktu	Proses survei diselesaikan tepat pada waktunya
Kelengkapan	Data sudah cukup kaya sehingga analisis data dapat menjawab pertanyaan penelitian, tanpa harus membebani partisipan secara berlebihan
Koherensi	Apabila temuan dicek silang dengan data lain dari sumber yang berbeda, akan menghasilkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda

Teknik Pengumpulan Data Survei

Memilih metode administrasi survei merupakan keputusan penting yang harus diambil oleh peneliti. Survei dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan bertanya langsung pada responden lalu merekam jawabannya, atau instrumen dapat diisi secara mandiri oleh responden (*self-report*). Ketika diputuskan bahwa survei diadministrasi dengan wawancara, peneliti dapat mewawancarai responden melalui telepon (*telephone-based survey*), *interactive voice response* (IVR), atau langsung dengan tatap muka. Apabila instrumen diisi secara mandiri oleh partisipan, survei dapat menggunakan cara klasik, yaitu menggunakan kertas (*paper-based*). Alternatif yang saat ini populer digunakan adalah menggunakan *platform* penyedia layanan kuesioner daring, seperti Google Forms, LimeSurvey, Qualtrics, SosSci Survey, dsb. Kuesioner dapat diisi secara klasikal, di mana partisipan dikumpulkan dalam satu ruangan lalu mengisi kuesioner bersama-sama, atau dapat juga diisi secara mandiri dengan perangkat yang disediakan peneliti atau yang dimiliki sendiri oleh responden.

Peneliti juga punya banyak pilihan strategi dalam merekrut responden, yaitu dapat dengan mengirim surat elektronik, mengeposkan kuesioner ke alamat responden, merekrut melalui *platform crowdworkers* seperti Amazon Mechanical Turk (MTurk), Clickworker, atau Prolific. Peneliti juga dapat memasang iklan atau undangan berpartisipasi di media sosial atau menyebarkannya secara berantai melalui aplikasi *instant messaging*,

seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Yang perlu diperhatikan, merekrut responden melalui *platform crowdworkers* atau melalui pesan berantai dan pemasangan iklan di media sosial atau aplikasi *instant messaging* berimplikasi pada tidak mungkinnya proses *sampling* dilakukan karena keputusan berpartisipasi sangat bergantung pada kesediaan responden. Artinya, responden yang berpartisipasi adalah orang adalah yang secara sukarela bersedia berpartisipasi, bukan yang dipilih oleh peneliti melalui proses penentuan sampel. Oleh karena itu, merekrut dengan strategi ini berisiko menimbulkan *self-selection bias* (Bethlehem, 2010).

Survei Opini Publik, Hitung Cepat (*Quick Count*), dan *Exit Poll*

Menjelang pemilihan umum, aktivitas survei opini publik yang diselenggarakan oleh lembaga survei non-pemerintah marak menghiasi pemberitaan. Sejak kali pertama diperkenalkan oleh ilmuwan psikologi, George Gallup, yang melakukan survei opini publik menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1933, survei opini publik merupakan bagian penting dari proses demokrasi di beberapa negara (Donsbach, 2015). Di Indonesia, survei opini publik marak dilakukan pasca pemerintahan Orde Baru dan mulai menjadi bagian penting dari politik elektoral di Indonesia sejak pemilihan umum tahun 2004. Sejak era Orde Baru berakhir, masyarakat tampaknya sudah memiliki aspirasi yang konkret mengenai kualitas figur yang mereka harapkan untuk menempati jabatan publik. Kualitas ini lebih mengarah pada kinerja daripada ikatan primordial sehingga politisi mulai tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai calon pemilih mereka. Survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga survei dapat mengakomodasi kebutuhan ini (Mietzner, 2009).

Tidak hanya survei opini publik yang lazimnya dilakukan sebelum atau pada masa kampanye, lembaga survei juga melakukan hitung cepat (*quick count*) dan beberapa di antaranya melakukan *exit poll*. Berbeda dengan survei opini publik yang menggunakan individu pemilih sebagai unit analisis, hitung cepat menggunakan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel untuk memprediksi hasil pemilihan umum. Hasil penghitungan suara di TPS sampel kemudian diakumulasi dan dijadikan informasi sementara yang dapat diakses publik mengenai hasil pemilihan umum, sembari menunggu hasil perhitungan dan verifikasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum yang biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sebulan setelah pemungutan suara. *Exit poll* sedikit berbeda karena data didapatkan dengan mewawancarai pemilih segera setelah ia keluar dari TPS. Dari segi kecepatan, *exit poll* memungkinkan lembaga survei menyimpulkan temuan lebih cepat, setidaknya tidak jauh setelah

waktu pemungutan suara berakhir, sedangkan hitung cepat baru dapat dikumpulkan ketika penghitungan suara selesai dilakukan di TPS. Namun, dari segi akurasi, hitung cepat biasanya lebih akurat karena menggunakan data riil dari penghitungan suara di tingkat TPS.

Meskipun kerap kali dipertanyakan kredibilitasnya, seperti yang diuraikan penulis sebagai pembuka bab ini, mayoritas lembaga survei di Indonesia menyediakan informasi yang substansial mengenai perilaku pemilih. Dalam pemilihan presiden tahun 2019, misalnya, sebagian besar temuan dari survei opini publik yang dilakukan lembaga survei, menyebutkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendapatkan lebih banyak dukungan, yaitu sekitar mendekati sampai sedikit di atas 50 persen, sedangkan kompetitornya hanya mendapat sekitar 31-37 persen (Soderborg, 2019). Temuan ini sejalan dengan hasil pemilihan umum 2019, di mana Jokowi-Ma'ruf Amin meraup suara hingga 55.5 persen. Hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei juga terbukti amat akurat dengan rata-rata *sampling error* hanya kurang dari 1 persen (Intan, 2019).

Yang menarik, lembaga-lembaga survei di Indonesia memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam memprediksikan dukungan pemilih pada partai-partai Islam dari survei opini publik yang mereka selenggarakan. Pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019 misalnya, suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara konsisten lebih tinggi daripada yang diprediksikan dari survei opini publik yang dilakukan oleh kebanyakan lembaga survei (Fealy, 2014; Soderborg, 2019). Adanya kesenjangan antara survei opini publik mengenai dukungan pada partai-partai Islam dengan hasil pemilihan umum memantik pertanyaan-pertanyaan menarik; apakah responden sengaja "menyembunyikan" dukungannya pada partai Islam? Atau, apakah ada kemungkinan desain kuesioner yang digunakan mengandung bias yang merugikan pendukung partai Islam?

Soderborg (2019) menemukan bukti pemilih PPP dan PKS lebih mungkin "menyembunyikan" pilihan mereka ketika diwawancarai oleh lembaga survei, dibandingkan dengan pemilih partai lainnya. Mengingat dukungan pada partai Islam juga dapat dijelaskan oleh lokasi geografis pemilih karena pemilih partai Islam biasanya terkonsentrasi pada lokasi-lokasi tertentu, maka desain pengambilan sampel yang diterapkan lembaga survei dapat juga menjadi penyebab inakurasi ini. Soderborg (2019) juga menemukan bukti yang menguatkan dugaan ini, yaitu ada korelasi yang jelas antara jumlah sampel yang diambil lembaga survei dengan dukungan pada partai-partai Islam. Artinya, survei yang menggunakan jumlah sampel lebih banyak akan melaporkan tingkat keterpilihan partai-partai Islam yang lebih tinggi daripada survei dengan jumlah responden yang lebih sedikit. Lebih lanjut, ada juga kemungkinan partai-partai Islam

diuntungkan oleh proses kampanye yang lebih intensif pada hari-hari akhir menjelang pemungutan suara.

Pertanyaan mengenai kredibilitas lembaga survei bukan hal baru dan sebenarnya dapat diperiksa dengan cukup mudah dengan standar yang jelas, yaitu dengan memperhatikan *survey quality framework* (SQF) (Groves & Lyberg, 2010). Namun, yang kerap kali terjadi, dalam mengomunikasikan temuannya, lembaga survei terlalu berfokus pada *sampling error* dan tidak banyak informasi yang tersedia untuk mengevaluasi apakah lembaga survei melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengendalikan sumber kesalahan yang lain. Laporan yang dirilis lembaga survei biasanya hanya berupa rangkuman eksekutif dengan informasi yang sangat minimal sehingga sulit menakar akurasi temuan survei yang mereka lakukan, lebih-lebih apabila memperhatikan berbagai dimensi dalam *total survey error*. Laporan yang dirilis juga sering kali hanya mencantumkan persentase atau proporsi absolut, tidak sekaligus dengan rentang kepercayaannya. Hal ini konsisten dengan yang dituliskan Biemer (2010), yaitu meskipun peneliti di lembaga akademik dan biro statistik milik pemerintah sudah mulai menetapkan standar kualitas yang ketat dengan mengadopsi SQF, praktik yang sama tidak ditemui pada lembaga survei non-pemerintah.

Dalam mengomunikasikan temuan penelitian survei, utamanya untuk kepentingan akademik, peneliti sangat disarankan untuk selalu melaporkan rentang kepercayaan (*confidence interval*) untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai akurasi estimasi yang dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar *outlet* publikasi ilmiah terkemuka sudah mensyaratkan pelaporan rentang kepercayaan, utamanya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh *American Psychological Association* (APA) (Appelbaum, dkk., 2018). Misalnya, apabila berdasarkan hasil survei kandidat A memperoleh 64% suara dengan *sampling error* sebesar 6 persen, maka seharusnya dalam laporan disebutkan, "... berdasarkan hasil survei, kandidat A mendapatkan dukungan terbanyak, yaitu sekitar 64% (95% CI 59-70%) responden penelitian.."

Kurangnya transparansi dan kontrol publik merupakan kritik yang paling sering dilontarkan pada lembaga survei. Laporan lengkap, data mentah, dokumentasi, dan metadata dari survei opini publik yang mereka umumkan hasilnya juga tidak bisa diakses terbuka sehingga sulit untuk menakar kredibilitas temuannya. Meskipun beberapa lembaga survei yang dipandang profesional sudah memulai tradisi baik dengan bersedia memaparkan data hitung cepat yang dikumpulkan pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang lalu (Intan, 2019), informasi yang diberikan sangat terbatas sehingga sulit menakar apakah temuan tersebut dapat direka ulang (*reproducibility*). Data hitung cepat yang dipaparkan Cyrus Network dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada

momen tersebut, misalnya, disajikan dalam bentuk statis dalam format .html dan nyaris tidak memiliki kegunaan sama sekali untuk diperiksa, apalagi disimpulkan akurasi estimasinya. Informasi krusial lainnya seperti desain *sampling* juga tidak ditemukan.

Lembaga survei di Indonesia juga menghadapi dilema yang sama seperti kolega mereka di Amerika Serikat. Banyak literatur yang menyebutkan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat pengaruh lembaga survei pada demokrasi modern. Yang pertama, hasil survei dapat mendorong kebijakan yang cenderung populis yang kemungkinan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip rasionalitas ataupun praktik baik pemerintahan (*good governance*). Yang kedua, ada tendensi bahwa hasil survei opini publik mungkin kurang akurat, bias, dan merupakan instrumen yang cenderung manipulatif (karena sebagian ditujukan untuk membentuk opini publik dan bagian dari pemasaran politik) dalam kompetisi antar-elite politik. Persoalan ini amat relevan dengan kondisi politik elektoral di Indonesia yang punya problem klasik, yaitu politik uang (*vote buying*) dan patrimonialisme (pembagian kekuasaan berdasarkan hubungan kekerabatan) (Mietzner, 2009).

Sejak pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, politisi menyadari bahwa meningkatkan popularitas dirinya di mata pemilih akan meningkatkan peluang dirinya untuk benar-benar terpilih. Implikasinya, politisi yang berlaga di pemilihan umum akan sangat memperhatikan profil pemilih dan mewujudkan aspirasi pemilih yang tercermin dari hasil survei opini publik. Akhirnya, politisi tergoda untuk menggunakan jasa konsultan pemasaran politik dan *branding* agar dapat (secara artifisial) meningkatkan popularitas mereka (Mietzner, 2009). Akibatnya, selain biaya politik menjadi semakin besar, lembaga survei membaca permintaan ini sebagai peluang bisnis dengan sekaligus menyediakan jasa konsultan politik (Hidayat, 2018). Celaknya, lembaga survei yang menyediakan jasa konsultan tidak mengungkapkan konflik kepentingan ini ketika mengumumkan temuannya, membuat publik semakin ragu dengan kredibilitas mereka. Padahal, menyertakan seluruh informasi yang mungkin menjadi sumber konflik kepentingan adalah kewajiban akademisi ketika melaporkan temuan penelitian.

Dalam situasi yang tidak ideal, di mana informasi yang diperlukan untuk memeriksa kesahihan temuan survei tidak banyak tersedia, pemilih dapat melakukan tiga hal agar informasi dari survei opini publik dapat berguna. Yang pertama, hindari mengambil informasi secara eksklusif hanya dari satu lembaga survei. Lebih bijaksana apabila pemilih membandingkan temuan beberapa lembaga survei sekaligus, kemudian setelahnya membuat kesimpulan atas berbagai temuan yang dirilis beberapa lembaga survei yang berbeda. Yang kedua, apabila selisih antara hasil survei opini publik, hitung

cepat, atau *exit poll* yang dikeluarkan suatu lembaga survei dengan hasil pemilu yang sebenarnya (*real count*) lebih atau kurang dari *sampling error* yang dilaporkan, maka kemungkinan desain *sampling* lembaga tersebut kurang andal. Yang ketiga, apabila lembaga survei mengadopsi sekian derajat transparansi (misalnya, menyediakan rilis pers atau ringkasan eksekutif yang bisa diakses publik), maka setidaknya lembaga tersebut lebih bisa dipercaya daripada yang tidak melakukannya sama sekali.

Ada banyak misteri dan problem yang meliputi survei opini publik yang dilakukan lembaga survei sehingga meskipun mengadopsi metode ilmiah, sulit rasanya mengkonsiderasi temuan survei opini publik sama kualitasnya dengan penelitian yang dilakukan akademisi (yang biasanya melalui proses tinjauan sejawat) atau survei yang dilakukan oleh statistisi di biro statistik dan lembaga penelitian milik pemerintah seperti BPS atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Namun, yang perlu diingat, seluruh survei, terlepas dari siapa pun yang menyelenggarakannya, tidak mungkin benar-benar terbebas dari sumber kesalahan dan bias. Lalu, apabila survei tidak mungkin terbebas dari kesalahan, lalu survei seperti apa yang benar-benar kredibel?

Edward Deming (1944) memiliki jawaban yang menarik.

"... uraian sebelumnya mengenai sumber kesalahan survei jangan diartikan bahwa kita perlu berkecil hati atau kemudian menyimpulkan bahwa survei tidak berguna sama sekali. Yang saya maksudkan di sini, akurasi yang disyaratkan agar temuan survei dianggap berkualitas sering kali dlebih-lebihkan—bahkan mungkin sama sekali tidak mungkin dicapai sepenuhnya. Namun, yang perlu diingat, data survei yang tersedia ternyata bermanfaat untuk memberikan dasar yang rasional untuk bertindak (hal. 369)."

Memang ada banyak problem yang meliputi kredibilitas hasil survei opini publik. Namun setidaknya mengambil keputusan yang terpandu oleh data (*informed decision-making*) jauh lebih baik dan lebih bisa diandalkan daripada hanya mengandalkan intuisi.

Penelitian Eksperimen

Eksperimen merupakan desain penelitian yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam teorisasi Psikologi. Eksperimen biasanya digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel penelitian. Ada tiga jenis variabel dalam penelitian eksperimen, yaitu variabel dependen (*outcome variable*), variabel independen (prediktor), dan variabel *extraneous*. Penelitian eksperimen murni (*true experiment*) sedikitnya melibatkan tiga aspek, yaitu kontrol (dengan pengacakan), manipulasi, dan pengukuran (observasi) atas efek yang ditimbulkan dari

manipulasi yang dilakukan. Variabel independen paling sedikit memiliki dua variasi (atau kondisi), yaitu kondisi perlakuan (*treatment*) dan yang kedua adalah kontrol (atau perbandingan). Pengukuran yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeteksi perubahan di masing-masing kondisi tersebut disebut juga variabel dependen. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada individu (variabel dependen) disebabkan oleh perbedaan perlakuan (variabel independen) yang diterima.

Penelitian eksperimen adalah desain penelitian yang andal untuk menguji hubungan sebab-akibat karena memungkinkan peneliti untuk memenuhi syarat penyimpulan hubungan sebab-akibat, berbeda dengan penelitian non-eksperimental seperti survei. Untuk mengonfirmasi adanya hubungan sebab-akibat, tiga syarat berikut ini harus terpenuhi (Shaughnessy, Zechmeister, & Zechmeister, 2012). Yang pertama adalah kovariansi, yang dapat dipenuhi peneliti dengan menemukan bukti bahwa ada korelasi/hubungan antara variabel dependen dan independen.

Yang kedua adalah hubungan tersebut harus memenuhi asumsi urutan dan waktu kejadian. Menemukan korelasi antar dua variabel dengan desain survei *cross-sectional*, misalnya, tidak cukup memberikan bukti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan sebab-akibat. Logikanya, sebab dan akibat selalu terikat pada urutan dan waktu kejadian, sebab selalu lebih dulu muncul, kemudian diikuti oleh akibat yang terjadi setelahnya. Survei *cross-sectional* tidak mengakomodasi waktu dalam desainnya, tetapi pada survei dengan desain longitudinal atau *time-series*, hubungan sebab-akibat masih mungkin untuk diinvestigasi. Oleh karena itu, ketika survei *cross-sectional* menemukan kaitan antara kepuasan pemilih atas kinerja calon presiden dengan tingkat elektabilitasnya, misalnya, tidak bisa disimpulkan keduanya memiliki hubungan sebab-akibat karena peneliti tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan mana variabel yang menjadi penyebab atau akibat.

Akan tetapi, mengakomodasi urutan dan waktu kejadian belum sepenuhnya memadai untuk mengonfirmasi hubungan sebab-akibat. Peneliti harus mengecualikan semua variabel yang mungkin berkaitan dengan variabel dependen sehingga ia benar-benar yakin bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh variabel independen, bukan oleh variabel lainnya (*extraneous*) (catatan: ingat kembali definisi *severe testing* yang diuraikan pada bagian pertama). Oleh karena itu, untuk mengklaim hubungan sebab-akibat, peneliti perlu melakukan prosedur kontrol yang dapat dilakukan dengan cara; (a) membuat variabel *extraneous* bernilai tetap/konstan (dengan teknik konstansi); (b) melakukan penugasan acak, yaitu pengacakan ketika menentukan responden mana yang menerima kondisi kontrol dan perlakuan (*random assignment*); dan (c) mengacak

urutan pemberian perlakuan apabila responden menerima lebih dari satu perlakuan (*balancing*).

Apabila penelitian eksperimen dapat memenuhi ketiga syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan penelitian eksperimen memiliki validitas internal, artinya peneliti benar-benar yakin bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen disebabkan oleh perubahan/perbedaan/variasi pada variabel independen. Namun, apabila karena alasan tertentu peneliti tidak mungkin menerapkan kontrol dengan melakukan pengacakan, maka penelitian tersebut tidak dapat disebut eksperimen murni, melainkan *quasi-experiment* (Price, Jhangiani, Chiang, Leighton, & Cuttler, 2017).

Salah satu praktik yang dianggap sebagai standar baku emas dalam menjamin validitas internal penelitian adalah *double-blind randomised experiment* karena dapat menekan bias paling optimal. Artinya, dalam kondisi ini, baik peneliti maupun responden tidak mengetahui responden mana yang menerima perlakuan/kondisi tertentu. Apabila *double-blind randomisation* tidak mungkin dilakukan, maka setidaknya peneliti dapat melakukan *single-blind randomised experiment*, yaitu kondisi di mana peneliti dapat mengidentifikasi responden yang menerima perlakuan tertentu, tetapi responden tidak tahu ia masuk pada kondisi kontrol atau kondisi eksperimen. (Catatan: validitas internal dalam penelitian eksperimen adalah konsep yang berbeda dengan validitas alat ukur Psikologi)

Ada dua jenis desain eksperimen yang paling lazim diterapkan pada penelitian-penelitian psikologi pada umumnya, yaitu perbandingan kelompok independen (*between-group design*) dan pengukuran berulang (*repeated measurement* atau *within-subjects design*). Pemilihan desain ini berimplikasi pada penerapan strategi kontrol yang berbeda.

Between-Group Design

Dalam desain *between-group* setiap responden hanya menerima satu jenis perlakuan. Peneliti dapat melakukan kontrol dengan menerapkan penugasan acak, yaitu dalam menentukan responden mana yang masuk di kelompok apa, peneliti melakukan pengacakan. Dalam asumsinya yang paling ketat, supaya melakukan pengacakan dengan sempurna, peneliti setidaknya harus memenuhi dua asumsi, yaitu (a) setiap responden memiliki peluang yang sama untuk masuk di setiap kondisi yang ada (apabila ada dua kondisi, maka satu responden memiliki peluang yang sama, yaitu 50%, pada masing-masing kondisi) dan (b) penentuan kondisi yang diterima responden harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh responden lainnya (Price, dkk, 2017).

Within-Subjects Design

Dengan menggunakan desain *within-subjects*, peneliti memiliki kontrol yang lebih besar. Apabila responden memberikan reaksi yang berbeda ketika diberikan perlakuan yang berbeda pula, dampak variabel *extraneous* yang mungkin mengganggu penarikan kesimpulan dapat diminimalisasi sehingga validitas internal eksperimen lebih mudah dicapai. Menggunakan desain *within-subjects* juga memungkinkan prosedur analisis statistik yang mengecualikan peranan variabel *extraneous* ini dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Oleh karena itu, efek variabel independen dalam menyebabkan perubahan pada variabel dependen akan lebih mudah dideteksi (Price, dkk., 2017).

Meskipun memiliki keunggulan, desain eksperimen *within-subject* memiliki beberapa potensi masalah (Price, dkk., 2017), seperti responden mungkin dapat "menebak" hipotesis yang diuji (*order effect*), pengukuran sebelumnya berdampak pada respons pengukuran berikutnya (*carry-over effect*), atau responden memberikan performa yang lebih baik ketika mengerjakan suatu tugas karena telah mendapatkan kesempatan berlatih dari mengerjakan tugas yang sebelumnya ia lakukan (*carry-over effect*). Selain itu, responden bisa saja mengalami kelelahan (*fatigue effect*) atau ada peluang responden mengubah reaksi mereka ketika diberikan stimulus tertentu yang disebabkan oleh pengalaman mereka ketika diberikan perlakuan sebelumnya (*context effect*).

Solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengoreksi efek urutan (*order effect*) adalah dengan menerapkan teknik *counterbalancing* (Price, dkk., 2017; Shaughnessy, dkk., 2012). Cara terbaik melakukan *counterbalancing* adalah dengan menerapkan *complete counterbalancing*, yaitu dilakukan dengan prosedur: *pertama*, mendeteksi kombinasi urutan yang mungkin dari seluruh kondisi eksperimen, misalnya kalau menggunakan contoh di atas (tiga kondisi) maka ada enam urutan yang mungkin (123, 132, 213, 231, 312, 321). *Kedua*, peneliti membagi responden secara acak ke dalam sejumlah kelompok (mengikuti jumlah urutan yang mungkin) sehingga seluruh urutan perlakuan dicobakan pada responden penelitian. Selain itu, setiap urutan perlakuan dicobakan pada responden dengan jumlah yang sama. Misalnya, apabila peneliti merekrut 120 responden, maka masing-masing urutan akan diujikan pada 20 responden.

Complete counterbalancing masih mungkin dilakukan ketika penelitian memiliki jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Namun, ketika peneliti memiliki banyak sekali perlakuan, maka untuk menerapkan *complete counterbalancing*, peneliti perlu merekrut responden dalam jumlah besar. Misalnya, apabila peneliti ingin mencobakan 8 perlakuan, maka setidaknya ada 64 urutan (8×8) yang mungkin. Kalau masing-masing

urutan diujikan pada 10 responden saja, maka peneliti membutuhkan setidaknya 640 responden. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti dapat melakukan *random counterbalancing*, yaitu urutan perlakuan langsung ditentukan secara acak untuk setiap responden. Namun, kerugiannya, sangat mungkin ada urutan perlakuan yang terlewat tidak diujikan. Teknik ini mungkin tidak seandal *complete counterbalancing* tetapi apabila peneliti mengantisipasi efek urutan yang tidak terlalu substansial atau desain eksperimen mengandung jumlah perlakuan/kondisi yang cukup banyak, maka opsi ini yang paling rasional untuk dilakukan (Price, dkk., 2017).

Pendekatan Survei Eksperimen

Beberapa tahun terakhir, desain yang menggabungkan kekuatan penelitian survei dan eksperimen cukup sering digunakan. Survei eksperimen adalah desain penelitian eksperimen yang dikombinasikan dengan desain survei *cross-sectional* dengan tujuan menguji hubungan kausalitas dan melakukan inferensi temuan penelitiannya pada populasi target yang lebih besar (Gaines, Kuklinski, & Quirk, 2007). Survei eksperimen disebut sebagai terobosan penting yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan sampel yang representatif dalam skala nasional (Mullinix, Leeper, Druckman, & Freese, 2015). Dengan melakukan survei eksperimen, temuan penelitian eksperimen murni, yang awalnya problematik ketika digeneralisasikan pada konteks di luar laboratorium, memiliki validitas eksternal yang lebih baik.

Berbagai perangkat lunak dan *platform* penyedia layanan kuesioner daring, sudah menyediakan fitur pengacakan dan menyertakan opsi penyertaan stimulus (dapat berupa visual, audio, bahkan multimedia) dan dapat dilakukan secara otomatis. Mengustomisasi pengaturan kuesioner sesuai dengan kebutuhan peneliti, misalnya menambah perintah pengacakan dan *counterbalancing* juga semakin mudah dengan bantuan bahasa pemrograman yang sederhana. Merekrut responden dalam jumlah besar juga dapat dilakukan melalui *platform crowdsourcing*.

Dalam ilmu politik, pendekatan survei eksperimen sering juga digunakan untuk menyelidiki respons publik terhadap suatu kebijakan dan aktornya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Isani dan Silverman (2016) menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat cenderung membentuk opininya atas suatu kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat bergantung dari latar belakang primordial tokoh asing yang menjadi target kebijakan tersebut. Responden penelitian cenderung menilai sangat negatif tokoh asing yang beragama Islam, dibandingkan dengan yang beragama Kristen. Ekspresi identitas politik yang sifatnya retorik (ucapan

Allahu Akbar), berupa kebijakan (penerapan syariat Islam), dan label (Islam radikal) juga menghasilkan kekuatan sikap yang berbeda.

Penelitian Meta

Satu penelitian empirik lazimnya menggunakan jumlah sampel yang tak terlalu banyak sehingga punya keterbatasan daya generalisasi. Pembaca juga sering dibingungkan karena penelitian-penelitian yang menguji hipotesis yang sama, sering kali berakhir pada kesimpulan yang saling bertolak belakang. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di populasi, peneliti sebaiknya tidak terlalu mengandalkan hanya satu hasil studi empirik, tetapi mempertimbangkan semua bukti, meskipun bukti-bukti tersebut sering kali bertentangan satu sama lain.

Untuk menjawab kebutuhan ini, peneliti metodologi mengusulkan model tinjauan sistematis atas temuan-temuan penelitian yang sudah ada (*research-on-research*) (Ioannidis, 2018). Penelitian meta (*meta-research*) bertujuan untuk melakukan sintesis atas akumulasi pengetahuan yang sudah tersedia dengan dua desain yang dapat dipilih, yaitu tinjauan sistematis (*systematic review*) (Khan, 2003) dan meta-analisis (Israel & Richter, 2011). Perbedaan yang menonjol dari penelitian meta dengan desain lain yang sebelumnya telah dijelaskan adalah unit analisisnya. Apabila dalam penelitian eksperimen dan survei unit analisis umumnya adalah individu, penelitian meta menggunakan hasil studi (artikel penelitian) sebagai sampel. Apabila di penelitian survei dan eksperimen jumlah sampel disimbolkan dengan n , maka simbol jumlah (artikel) sampel dalam penelitian meta disimbolkan dengan k .

Beberapa ahli sepakat menempatkan penelitian meta di puncak hierarki bukti saintifik karena mengandung bias yang paling kecil sekaligus kecermatan ilmiah yang paling tinggi (Ioannidis, 2018; Israel & Richter, 2011; Wampold, Ahn, & Kim, 2000).

5*	Tinjauan sistematis dan meta analisis	Setelah mempertimbangkan semua bukti dari studi yang menyelidiki efektivitas strategi <i>vote-buying</i> (politik uang) dalam meningkatkan jumlah suara yang diperoleh kandidat, disimpulkan bahwa strategi ini tidak efektif mendulang suara.	Bukti yang andal dan dapat digunakan secara terbatas pada konteks tertentu
6	Eksperimen murni (<i>randomized controlled experiments</i>)	Siswa SMA yang dipilih secara acak menerima perlakuan inokulasi akan menunjukkan resistensi terhadap berita bohong yang lebih tinggi dan lebih mampu bersikap kritis ketika membaca isi berita bohong, daripada siswa yang tidak menerima perlakuan inokulasi.	Temuan menjanjikan dan tentu saja amat penting untuk dikonfirmasi melalui studi lanjutan dengan metode yang lebih cermat
4	Perbandingan kondisi sebelum-sesudah dengan melibatkan beberapa kelompok, penelitian longitudinal, dan <i>cohort studies</i>	Angka persepal korupsi cenderung lebih rendah di berbagai kabupaten/kota yang menerapkan sistem <i>e-budgeting</i> , daripada kabupaten/kota yang tidak menerapkannya.	Temuan menarik dan mungkin dapat diteliti lebih lanjut dengan metode yang lebih baik
3	<i>Quasi-experiment</i> (perbandingan kondisi sebelum-sesudah) kemudian dibandingkan dengan satu kelompok yang lain	Angka kriminalitas menurun setelah perda Syarat disahkan di kota A, namun hal yang sama tidak terjadi di kabupaten B.	Cenderung meragukan gunakan hanya ketika tidak ada bukti lain yang tersedia
2	Perbandingan <i>cross-sectional</i> antara kelompok <i>treatment</i> dengan kontrol, atau perbandingan kondisi sebelum dan sesudah diberi perlakuan	Pemilih yang lebih sering terpapar teori-teori konspirasi dan berita bohong akan lebih mungkin bersikap partisan sebagai pendukung salah satu kandidat calon Presiden.	
1	Survei <i>cross-sectional</i> tanpa melibatkan perbandingan kelompok	Di Sumatera Barat, calon anggota legislatif dari partai Islam lebih mungkin terpilih daripada caleg dari partai nasionalis.	
0	Laporan penelitian internal yang bersifat komersial dan tidak melewati proses tinjauan sejawat	Hasil survei elektabilitas yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang menyediakan jasa konsultan pemasaran politik.	
0	Opini ahli, anekdot, dan studi kasus	Pendapat ahli dalam tulisan opini yang dimuat di media massa	

Gambar3. Hierarki Bukti Saintifik

Meskipun memberikan bukti yang cenderung lebih andal daripada metode lainnya, meta-analisis bukanlah metode yang bebas dari masalah. Persoalan yang paling sulit diselesaikan dan berdampak besar pada kredibilitas temuan meta-analisis adalah bias publikasi, yang akan lebih lanjut dijelaskan di bagian berikutnya.

Penyimpulan Karakter Tokoh Politik dengan Pendekatan at a Distance

Peneliti yang tertarik menginvestigasi kondisi psikologis, bahkan kepribadian dan kondisi kesehatan mental seorang tokoh politik, perlu mengembangkan strategi asesmen yang inovatif karena akses langsung yang memungkinkan pengumpulan data primer tidak mudah didapatkan. Akhirnya, peneliti mengandalkan data-data yang tersedia di media massa atau di ruang publik lainnya untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan *at a distance* (Schafer, 2000).

Salah satu contoh yang paling menarik adalah kasus pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1964 yang melibatkan dua kandidat, yaitu Barry Goldwater dari Partai Republik dan Lyndon Johnson dari Partai Demokrat. Pada masa kampanye, majalah *Fact* menerbitkan sebuah artikel provokatif yang berjudul, "1.189 psikiater menyatakan bahwa Goldwater, secara psikologis, tidak mumpuni menjadi presiden!" Substansi artikel tersebut ditulis berdasarkan hasil survei pada sejumlah psikiater, yang pertanyaannya mencakup stabilitas emosi dan kemampuan memimpin kedua kandidat. Celakanya, hasil "riset" tersebut dimanfaatkan oleh rivalnya yang kemudian memenangkan pemilihan umum, untuk melancarkan

sebuah iklan kampanye negatif yang sangat merugikan pihak Goldwater. Tim pemenangan Goldwater mengajukan dan kemudian memenangkan gugatan hukum atas majalah *Fact*, lalu diikuti keluarnya pengumuman dari American Psychiatric Association (APA) yang melarang psikiater untuk memberikan diagnosis atau evaluasi psikologis seorang tokoh publik tanpa pemeriksaan langsung ataupun persetujuan dari tokoh yang dimaksud. Larangan ini dikenal sebagai *Goldwater rule* (Davis, 2017; McNally, 2018).

Usai pemilihan umum yang brutal tersebut, *Goldwater rule* sempat sementara dilupakan publik Amerika Serikat, tetapi kembali muncul dan kembali menuai kontroversi ketika pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 yang lalu. Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik menunjukkan serangkaian perilaku yang sangat tidak biasa, berbahaya, dan menurut beberapa psikolog sudah mengarah pada diagnosis gangguan kepribadian narsistik (Lilienfeld, Miller, & Lynam, 2018). Meskipun begitu, para psikiater memilih untuk menghindari memberikan komentar karena terikat *Goldwater rule*. Namun, yang sesungguhnya terjadi, para psikiater dan psikolog sebenarnya tidak satu suara ketika dimintai pendapat tentang etis tidaknya metode *at a distance*.

Sebagian psikolog mengkritik "kekolotan" para psikiater dan menekankan bahwa mengedukasi pemilih mengenai buruknya kondisi psikologis Donald Trump akan menyelamatkan publik dari bahaya yang mungkin timbul akibat kebijakan-kebijakan yang diambil Trump, kalau ia benar-benar menjadi presiden. Karena lebih besarnya kepentingan publik yang harus diselamatkan, Lilienfeld, dkk. (Lilienfeld, dkk., 2018) menyebutkan *Goldwater rule* sudah tidak relevan lagi pada masa kini. Lilienfeld, dkk. (2018) juga menekankan bahwa meskipun American Psychological Association (APA) memperingatkan psikolog untuk ekstra hati-hati ketika memberikan opini profesional di depan publik, psikolog tidak terikat pada *Goldwater rule* sehingga memiliki "kewajiban moral" untuk melakukan edukasi kepada pemilih.

Alasan tidak adanya persetujuan (*informed consent*) dari tokoh publik yang dianalisis juga dipandang bukan persoalan besar karena metode *at a distance* bukan diagnosis formal yang dihasilkan dari suatu pemeriksaan medis, melainkan sekadar komentar atau opini profesional. Selain itu, data yang digunakan untuk menyusun profil psikologis seorang tokoh publik merupakan data yang tersedia di media massa dan ruang publik lainnya, bukan informasi primer yang diperoleh dari relasi psikolog/terapis dengan klien dalam sesi terapi atau konseling sehingga tidak ada etika hubungan profesional (*confidentiality*) yang dilanggar (Lilienfeld, dkk., 2018).

Persoalannya, masyarakat awam yang menjadi target edukasi tidak benar-benar memahami perbedaan antara diagnosis dengan opini

profesional sehingga di luar konteks etika, ada pertanyaan besar mengenai apakah informasi yang diperoleh dari metode *at a distance* akan berguna bagi pemilih untuk membuat keputusan yang rasional. Lilienfeld, dkk. (2018) juga tidak menafikan kemungkinan bahwa peneliti yang partisan akan menggunakan metode *at a distance* dengan motivasi mendiskreditkan kandidat yang tidak disukainya, lebih-lebih ketika dilakukan pada masa kampanye. Kritik yang dilontarkan oleh McNally (2018) pada Lilienfeld, dkk. (2018) amat tajam, yaitu ia menyebutkan bahwa menggunakan metode *at a distance* untuk mengedukasi publik mengenai status mental seorang kandidat yang berlaga dalam pemilihan umum justru tindakan yang tidak perlu, tidak efektif, dan kontraproduktif karena sesungguhnya publik bukanlah pihak yang diuntungkan.

McNally (2018) menyebutkan bahwa dengan menggunakan akal sehat saja, rekam jejak dan riwayat perilaku Trump sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan masyarakat agar tidak memilihnya. Namun, pendukung garis keras Trump mengabaikan fakta ini sehingga kecil kemungkinannya opini profesional dari psikolog atau psikiater akan mengubah keputusan mereka. Justru sebaliknya, ada potensi bahwa opini profesional mengenai status mental Trump justru akan memancing kemarahan dan membuat pendukungnya semakin partisan. Antusiasme pendukung Trump sesungguhnya akan dengan sendirinya memudar ketika ia gagal mewujudkan janji-janji kampanyenya dalam kebijakan yang ia rumuskan selama menjabat.

Meskipun ada banyak kontroversi, ketika metode ini diarahkan untuk mendeskripsikan karakter tokoh publik dalam kerangka preferensi kebijakan yang dipilihnya, sebenarnya akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi publik. Para ahli yang berkumpul di simposium *Issues in Assessing Psychological Characteristics at a Distance* pada konferensi tahunan International Studies Association pada tahun 1998 menghasilkan *The Operational Code* (Schafer, 2000) yang merupakan panduan yang dapat digunakan psikolog politik untuk mengevaluasi pandangan umum (*worldview*) seorang pemimpin politik yang diukur dari kebijakan luar dan dalam negeri yang dipilihnya. Asumsinya, metode ini seharusnya dilakukan pada pemimpin politik yang sedang menjabat (dengan begitu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan) dan tidak dilakukan pada masa kampanye. Dengan lebih banyak berfokus pada kebijakan, bukan status mental atau *trait* yang sifatnya amat subjektif, fungsi edukasi publik akan lebih mudah dicapai dan peneliti yang melakukannya tidak perlu menghadapi dilema etis.

Di Indonesia, metode *at a distance* pernah dilakukan dan juga menimbulkan pro-kontra. Namun, sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas dan mengikat mengenai apakah memberikan opini profesional

mengenai status mental seorang kandidat presiden, utamanya ketika masa kampanye, adalah tindakan yang etis untuk dilakukan. (Catatan: pembaca dapat membaca lebih lanjut mengenai kontroversi metode ini di *Buletin Psikologi Indonesia* edisi pertama (2019))

Pendekatan Interpretif (Kualitatif), Pengukuran Implisit, dan Pemrosesan Teks

Penelitian-penelitian di ilmu politik banyak dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretif yang mengandalkan kekuatan dan kekayaan narasi, analisis historis dan konseptual, bukan mengandalkan metode kuantitatif dan statistik. Meskipun paradigma yang sama agak jarang digunakan oleh peneliti psikologi politik, penelitian dengan pendekatan interpretif berpotensi dapat menghasilkan *insight* penting, yang melengkapi temuan-temuan dengan pendekatan kuantitatif.

Ada banyak sekali opsi desain penelitian dengan paradigma interpretif yang dapat digunakan oleh peneliti, mulai dari studi kasus (Kaarbo & Beasley, 1999), fenomenologi (Giorgi, 2012), analisis diskursus dan *conversational analysis* (Hammack & Pilecki, 2014), *content analysis* (Erişen, Erişen, & Özkeçeci-Taner, 2013), dan *grounded theory*. Penelitian kualitatif juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif sebagai *mixed-method research*, meskipun ada banyak kritik yang menyebutkan pendekatan *mixed-methods* sebagai desain yang tidak praktis dilakukan, mengingat jenis data dan proses yang dilakukan untuk memperoleh data sangat berbeda antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Symonds & Gorard, 2010).

Berikut adalah beberapa contoh penelitian di psikologi politik yang menggunakan pendekatan interpretif dan *mixed-methods*. Penelitian yang dilakukan oleh Hendry, dkk. (2007) yang menggunakan pendekatan *grounded theory* memberikan penjelasan yang menarik mengenai bagaimana remaja di Wales membentuk identitas kultural mereka dan utamanya menyelidiki penghayatan menjadi mayoritas/minoritas dapat menjelaskan proses pembentukan identitas ini. Penelitian McAdams, dkk. (McAdams, dkk., 2008) menggunakan desain *mixed-methods* untuk menyelidiki strategi orang-orang liberal dan konservatif di Amerika Serikat dalam menyimbolkan ideologi politik dan keyakinan moral mereka dengan menggunakan metafor keluarga.

Selain pendekatan interpretif, beberapa penelitian psikologi politik menggunakan pengukuran sikap implisit, utamanya dalam studi-studi *implicit political cognition* (Stone, dkk., 2014). Untuk topik-topik riset yang cenderung sensitif, seperti prasangka pada kelompok sosial tertentu, yang berpotensi menghasilkan respons yang *socially desirable*, pengukuran implisit dengan menggunakan *implicit association test* (IAT) amat populer digunakan. Komponen kunci dari IAT adalah waktu reaksi (*reaction time*) karena IAT berfungsi untuk mengungkap sikap tersembunyi yang sifatnya tak sadar (Jost, 2019). Meskipun sering dipertanyakan korespondensinya pada perilaku pemilih dalam konteks yang riil, IAT sering digunakan untuk mendeteksi efek bias rasial dalam menentukan keputusan memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa IAT memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi hasil pemilihan umum (Gawronski, Galdi, & Arcuri, 2015).

Metode penelitian yang terakhir adalah pemrosesan teks otomatis (*automated text processing*). Metode ini merupakan hasil interaksi berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu komputer, linguistik, dan psikologi. Unit analisis metode ini bukan individu, melainkan teks. Metode ini sangat berguna ketika diaplikasikan untuk menganalisis preferensi kebijakan, sentimen dalam orasi politik, bahkan kepribadian tokoh politik. Metode ini sedang berkembang pesat dan juga mulai sering digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku pemilih, berdasarkan unggahan dan komentar mereka di media sosial (Schoonvelde, Schumacher, & Bakker, 2019). Sub-disiplin ilmu komputer dan kecerdasan buatan, *natural language processing* (NLP) yang umumnya digunakan untuk mengembangkan teknologi *speech recognition*, juga sangat membantu peneliti psikologi politik dalam melakukan analisis pada komponen teks yang awalnya tak mampu dilakukan oleh mesin, seperti komponen afektif (dengan analisis sentimen) sampai ekspresi emosi yang lebih spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rheault, dkk. (2016) pada transkrip digital seluruh debat di parlemen Inggris selama kurang lebih 100 tahun menemukan bukti menarik, yaitu respons emosi yang ditunjukkan oleh anggota parlemen Inggris selama berdebat ternyata berkaitan dengan kondisi resesi ekonomi. Menggunakan metode yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Parackal, dkk. (2018) pada 858 responden di Selandia Baru menunjukkan nilai-nilai yang diyakini pemilih, yang dieksplorasi melalui jawaban partisipan atas beberapa pertanyaan terbuka yang diajukan peneliti, dapat memprediksi dengan baik keputusan memilih, bahkan lebih jauh lagi, dapat memberikan prediksi mengenai hasil pemilihan umum.

Isu-isu Etika dalam Penelitian Psikologi Politik

Penelitian psikologi umumnya menggunakan manusia sebagai subjek yang dipelajari sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa partisipasi responden dalam penelitian yang dilakukan tidak mengancam atau membahayakan kesejahteraan, baik diri peneliti sendiri, responden penelitian, bahkan masyarakat secara luas. Di Indonesia, hasil konsensus Psikologi Indonesia (HIMPSSI, 2010) yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Beberapa isu penting akan dikombinasikan dengan The Belmont Report (Morling, 2018) yang mengandung beberapa prinsip etik yang harus dijamin oleh peneliti.

Prinsip menghormati individu (respect for person)

Dalam The Belmont Report disebutkan bahwa peneliti wajib menghormati individu yang melibatkan dua aspek penting. Yang pertama, individu harus diperlakukan sebagai entitas yang otonom sehingga mereka harus diberikan kebebasan untuk memutuskan partisipasi mereka dalam penelitian. Berdasarkan prinsip ini, maka seluruh partisipasi, termasuk mengisi kuesioner yang tanpa menanyakan identitas pribadi (anonim), wajib mendapatkan persetujuan atas tindakan atau partisipasi (*informed consent*) dari responden. Setelah responden diberi informasi yang cukup mengenai riset yang sedang dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, serta keuntungan yang mungkin didapatkan dari partisipasi, mereka harus diberi kesempatan untuk memutuskan secara mandiri untuk berpartisipasi atau tidak.

Prinsip kebermanfaatan (beneficence)

Peneliti memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan responden yang berpartisipasi dalam penelitiannya, termasuk mengurangi risiko pengungkapan (*disclosure risk*), yaitu ketika informasi personal (yang berkaitan dengan identitas pribadi, informasi tentang perilaku, status mental, atau reaksi yang sifatnya personal) diketahui orang lain, termasuk peneliti. Untuk mencegah risiko ini, maka peneliti harus menjamin bahwa responden berpartisipasi secara anonim dengan tidak menanyakan segala informasi yang mengandung identitas pribadi, misalnya, nama, tanggal lahir, alamat, foto responden, nomor tanda pengenal (Nomor Induk Kependudukan, dsb.). Untuk kuesioner yang diadministrasi menggunakan survei daring, maka peneliti tidak boleh menyimpan penanda digital yang menandai perangkat yang digunakan responden, misalnya IP address. Apabila anonimitas tidak dapat dijamin, maka peneliti harus menjamin kerahasiaan (*confidentiality*) identitas atau informasi personal yang

dikumpulkan peneliti disimpan dengan baik dan tidak diberikan kepada pihak ketiga. Penyimpanan data juga dapat dilakukan secara terpisah, tidak dijadikan satu dengan data penelitian yang dianalisis.

Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, peneliti dilarang untuk berbohong atau menutupi sebagian informasi, yang kemungkinan berdampak pada keputusan berpartisipasi karena menimbulkan cedera fisik, ketidaknyamanan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan mengenai risiko ini harus dilakukan sebelum partisipasi dimulai agar responden dapat menimbang keputusannya dengan baik. Manipulasi hanya dibenarkan apabila tujuan penelitian amat penting dan tidak ada cara lain yang tersedia. Ketika situasi ini terjadi, maka peneliti tetap harus memberikan informasi pada partisipan bahwa ada informasi yang sengaja tidak diberikan kepada calon responden sebagai bagian dari prosedur penelitian. Namun, untuk memastikan tujuan manipulasi dibenarkan atau tidak, peneliti tidak boleh memutuskannya secara sepihak, melainkan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari lembaga yang bertanggung jawab memberikan persetujuan kelayakan etik.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mewajibkan peneliti untuk memastikan bahwa orang yang berpartisipasi dan orang yang mendapatkan manfaat dari temuan penelitian, mendapatkan manfaat yang setara (Morling, 2018). Misalnya, apabila berpartisipasi dalam suatu riset dianggap berisiko, maka tentu ini tidak adil karena responden penelitian harus "menanggung risiko" sedangkan orang yang mendapat manfaat dari riset tidak harus menanggungnya. Contoh konkretnya, semua orang prinsipnya mungkin menderita kanker sehingga tentu tidak adil ketika studi mengenai efektivitas obat yang ditengarai menghambat pertumbuhan kanker dilakukan pada responden dari keluarga miskin, atau etnis minoritas. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa responden yang ia rekrut untuk berpartisipasi adalah sampel yang representatif mewakili populasi yang akan mengambil manfaat dari studi tersebut.

Revolusi Kredibilitas: Coba Ulang (Reproducibility) dan Reka Ulang (Replicability) dalam Penelitian Psikologi

Di sebuah simposium yang berjudul "*False-Positive Findings are Frequent, Findable, and Fixable*" pada konvensi tahunan Society for Personality and Social Psychology (SPSP) di tahun 2012, Joseph Simmons, Leif Nelson, dan Uri Simonsohn memperkenalkan teknik yang kemudian disebut *p-curve* (Simonsohn, dkk., 2014), yang digunakan untuk mendeteksi praktik meragukan yang biasa dilakukan peneliti untuk mendapatkan

“hasil positif” (signifikan secara statistik), yang kemudian disebut dengan *p-hacking*. Pada simposium yang sama, Simmons, Nelson, dan Simonsohn juga mempresentasikan serangkaian “kebiasaan buruk” peneliti psikologi ketika melakukan penelitian, yang kemudian disebut sebagai praktik meneliti yang meragukan (*questionable research practice*).

Penelitian dengan “hasil positif” (signifikan secara statistik) lebih disukai dan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diterbitkan di jurnal sehingga praktik yang amat umum ditemui adalah peneliti hanya melaporkan hasil signifikan saja (*selective reporting*) (Rodgers & Pustejovsky, 2019) dan ‘menyimpan hasil yang tidak signifikan di dalam lemari’ (*file-drawer effect*) (Dalton, Aguinis, Dalton, Bosco, & Pierce, 2012). Dalam memutuskan apakah naskah yang sedang ditinjau akan diterbitkan atau tidak, editor terlalu sering menolak hasil negatif dan terlalu sering menerbitkan hasil positif. Bias ini disebut juga dengan bias publikasi (Rothstein, Sutton, & Borenstein, 2005). Adanya bias publikasi juga menunjukkan *body of knowledge* yang tersedia saat ini tidak benar-benar mencerminkan, bahkan mungkin menjadi distorsi, realitas yang sesungguhnya ingin dijelaskan.

Bias publikasi adalah ancaman besar bagi meta-analisis. Prinsipnya, meta-analisis hanya akan memberikan *insight* yang berguna ketika semua bukti yang tersedia diikutsertakan dalam analisis. Karena bias publikasi, penelitian dengan hasil-hasil negatif sulit dilacak dan ditemukan karena tidak dipublikasi. Besarnya dampak bias publikasi dapat dideteksi dengan beberapa teknik dan yang paling populer adalah menggunakan *funnel plot* (Peters, Sutton, Jones, Abrams, & Rushton, 2008). Meskipun meta-analisis duduk di posisi tertinggi hierarki bukti saintifik, meta-analisis menjadi tidak terlalu berguna ketika peneliti meta tidak melakukan koreksi terhadap bias publikasi. Saat ini peneliti meta sedang mencari strategi terbaik untuk mengoreksi efek bias publikasi dengan teknik statistik, tetapi berbagai teknik yang tersedia saat ini belum memberikan hasil memuaskan (van Aert, 2019).

Hasil penelitian sesungguhnya tidak terbentuk dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil interaksi antara keputusan-keputusan yang diambil peneliti dan pola yang ada di dalam data itu sendiri. Simmons, Nelson, dan Simonsohn (2011) menegaskan bahwa serangkaian keputusan yang diambil peneliti akan sangat berdampak pada hasil akhir penelitian. Fleksibilitas peneliti dalam mengambil keputusan (*researchers degree of freedom*) apalagi ketika dilakukan dengan alasan pragmatis, misalnya, agar mendapatkan hasil yang signifikan, akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan yang diambil peneliti agar mendapatkan hasil yang signifikan ini cenderung berada di wilayah abu-abu, tetapi akan mengubah total hasil penelitian.

Selain *selective reporting*, beberapa tindakan yang tergolong sebagai praktik meneliti yang meragukan adalah: (1) *P-value hacking/optional stopping*, yaitu mencakup keputusan peneliti mengambil data terus-menerus sampai memperoleh hasil yang sesuai keinginannya (signifikan secara statistik) dan/atau membuang sebagian data (utamanya yang ekstrem/*outlier*) dari analisis data (Head, Holman, Lanfear, Kahn, & Jennions, 2015). Bisa juga dengan tidak melaporkan seluruh kondisi eksperimen atau variabel dependen yang diukur dengan alasan tidak menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik (Simmons, dkk., 2011). (2) *Hypothesising after the results are known* (HARK-ing), yaitu kondisi di mana peneliti melaporkan bahwa hipotesis yang diuji telah diajukan sebelum data diambil, padahal kenyataannya peneliti mencocok-cocokkan berbagai variabel dalam satu dataset dan melaporkan hasil yang signifikan saja. (3) Pelaporan yang tidak lengkap dan pembulatan nilai p yang terlalu banyak (*incomplete reporting* dan *generous rounding*), yaitu ketika peneliti tidak melaporkan secara lengkap keputusan-keputusan penting yang menentukan hasil penelitian, seperti membuang data ekstrem (*outlier*) atau ketika peneliti tidak melakukan koreksi atas nilai p (misalnya menggunakan Tukey atau Bonferroni) ketika melakukan *post-hoc test*. Kadang-kadang ditemukan peneliti yang membulatkan ke bawah nilai p yang sedikit di atas 0.05, agar dapat dilaporkan signifikan (misalnya, melaporkan nilai $p = 0.053$ menjadi $p \leq 0.05$) (Barnett, Fraser, Parker, Nakagawa, & Fidler, 2018; John, Loewenstein, & Prelec, 2012).

Kombinasi antara rendahnya *statistical power*, bias publikasi, dan praktik meneliti yang meragukan menyebabkan terjadinya krisis kredibilitas dalam penelitian-penelitian psikologi sehingga imbasnya, klaim dan teori psikologi dicurigai mengandung *false positive* (Simmons, dkk., 2011). Krisis kredibilitas ilmu pengetahuan merupakan kegusaran yang banyak dibicarakan oleh komunitas akademik global sejak satu dekade terakhir, dan dialami oleh banyak sekali komunitas akademik di berbagai disiplin ilmu. Beberapa peneliti menyebut krisis kredibilitas sebagai krisis replikasi (coba ulang) (Yong, 2018), beberapa yang lain menyebut krisis *reproducibility* (reka ulang) (Fanelli, 2018).

Meskipun ada banyak kebingungan istilah, definisi coba ulang dan reka ulang mulai mencapai kesepakatan. Suatu teori dikatakan berhasil dicoba ulang (replikasi), apabila setelah dilakukan pengambilan data di lokasi yang berbeda (dengan tim peneliti yang berbeda) menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Sedangkan suatu penelitian dapat dikatakan berhasil direka ulang (*reproducible*) ketika temuan penelitian dianalisis ulang oleh peneliti lain dengan menggunakan data mentah, perintah (*syntax/codes*), metode, prosedur, dan rencana analisis yang sama dengan

peneliti aslinya, akan menghasilkan temuan yang sama pula (Committee on Reproducibility and Replicability in Science, dkk., 2019).

Sejak saat disadari, komunitas akademik mulai berbenah diri dengan mendorong peneliti untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu sering dilakukan. Salah satunya, yaitu mendorong perubahan kultur riset sehingga membuat riset lebih mudah diakses, transparan, akuntabel, dan mengedepankan kolaborasi karena praktik meneliti meragukan berkaitan dengan nuansa kompetitif dan tekanan kewajiban publikasi yang terlalu besar (Tijdink, Verbeke, & Smulders, 2014). Para peneliti yang mengadvokasi praktik sains terbuka (Spellman, Gilbert, & Corker, 2017) terus berusaha meyakinkan peneliti untuk mengubah cara mereka bekerja dan mengadvokasi pengambil kebijakan untuk memberikan penguatan positif pada peneliti yang bersedia mengadopsinya.

Petunjuk Praktis agar Penelitian dapat direka-ulang

Sebagai peneliti, tentu kita menginginkan agar temuan penelitian yang kita lakukan dianggap kredibel dan bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi penelitian selanjutnya, maupun bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, agar dapat direka ulang ada beberapa tips yang dapat dipraktikkan oleh peneliti.

Pra-Registrasi

Salah satu penyebab temuan penelitian gagal dicoba ulang dan direka ulang adalah akibat peneliti merumuskan dan menguji hipotesis dengan data yang sama padahal prediksi (merumuskan kesimpulan setelah melihat data) dan prediksi (mengajukan dugaan sebelum mengambil data) seharusnya dilakukan pada kelompok sampel yang berbeda (Nosek, Ebersole, DeHaven, & Mellor, 2018). Untuk menjamin transparansi sekaligus membantu peneliti memisahkan analisis yang sifatnya eksploratif (yang menghasilkan hipotesis) dengan konfirmatori (menguji teori) adalah dengan melakukan praregistrasi.

Praregistrasi adalah kegiatan mendaftarkan (melakukan registrasi) protokol atau rencana penelitian, yang terdiri dari; kriteria inklusi dan eksklusi, strategi pengukuran, aturan penghentian pengambilan data (*stopping rule*), perencanaan jumlah sampel, dan strategi analisis data. Protokol dapat disimpan di repositori publik, yang mudah diakses peneliti lain apabila diperlukan, yang memungkinkan dokumen praregistrasi mendapatkan stempel waktu (Veldkamp, dkk., 2018).

Ada kekhawatiran bahwa ide penelitian dapat dicuri atau ditiru peneliti lainnya ketika dokumen praregistrasi dapat diakses terbuka. Kegelisahan ini sangat wajar dan beralasan, tetapi dapat diatasi peneliti

dengan cara mengatur agar akses pada dokumen praregistrasi hanya bisa didapatkan oleh kalangan terbatas (misalnya, editor atau *reviewer* jurnal) dan membuatnya dapat diakses oleh publik ketika naskah sudah diterbitkan.

Manajemen Data Penelitian

Manajemen data penelitian adalah kegiatan yang amat penting dan sentral peranannya dalam menentukan kredibilitas riset. Data penelitian yang tidak dikelola dengan baik merupakan masalah yang dapat membuat penelitian sulit direka ulang. Untuk itu, peneliti amat disarankan untuk membagikan datanya secara terbuka sebagai bagian dari naskah publikasi (misalnya sebagai *supplementary materials*) dan agar data tersebut bermanfaat, maka sebaiknya disimpan dengan memperhatikan prinsip mudah dicari (*findable*), mudah diakses (*accessible*), mudah dimengerti (*interoperable*), dan mudah digunakan kembali (*reusable*) (FAIR) (Wilkinson, dkk., 2016). Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan:

1. Agar data mudah ditemukan (*findable*), maka peneliti dapat menyimpan datanya pada repositori yang memberikan *persistent identifier* seperti nomor *digital object identification* (DOI). Dengan begitu, peneliti juga mendapat rekognisi ketika datanya digunakan kembali.
2. Agar datanya mudah diakses (*accessible*) maka sebaiknya data disimpan di repositori terbuka (publik) yang dapat diakses oleh siapa pun. Menyimpan data di repositori institusi juga disarankan, selama tidak ada pembatasan akses.
3. Agar data mudah dimengerti (*interoperable*) maka dataset sebaiknya dilengkapi dengan metadata berupa kamus data (*codebook*) yang dapat disusun sesuai kaidah yang disepakati oleh komunitas akademik di masing-masing disiplin.
4. Agar data dapat digunakan kembali (*reusable*), maka data sebaiknya diberikan lisensi yang memungkinkan penggunaan ulang, misalnya *Creative Commons* (CC) atau *General Public License* (GNU) dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh mesin (*machine readable*)

Ketika membagikan data penelitian, peneliti harus memastikan bahwa dataset yang dibagikan sifatnya anonim, tidak mengandung informasi personal yang dapat memudahkan identifikasi responden yang berpartisipasi (*de-identified dataset*). Peneliti juga perlu menginformasikan kepada responden bahwa data penelitian akan disimpan di repositori dan dapat diakses terbuka. Apabila karena beberapa hal dataset mengandung risiko pengungkapan (*disclosure risk*) yang tak dapat diantisipasi, maka

peneliti dapat membatasi akses pada dataset hanya apabila ada permintaan akses. Opsi lain yang dapat dilakukan adalah membuat dataset sintetis, yaitu dataset yang berbeda dengan karakteristik yang sama persis dengan dataset aslinya (Quintana, 2019).

Terakhir, untuk menjamin transparansi dan membantu peneliti mengingat-ingat keputusan yang ia ambil ketika menganalisis data, pendekatan kendali versi (*version control*) dapat digunakan untuk merekam semua perubahan yang dilakukan, sekaligus sebagai *logbook* pengelolaan data (Sandve, Nekrutenko, Taylor, & Hovig, 2013). Repositori seperti GitHub dan Open Science Framework (OSF) menyediakan fitur kendali versi ini, sehingga semua perubahan atas dokumen yang disimpan dalam repositori akan terekam dengan baik.

Daftar Pustaka

- Barnett, A., Fraser, H., Parker, T. H., Nakagawa, S., & Fidler, F. (2018). Questionable Research Practices (QRPs) in Ecology and Evolution. *PLoS ONE*, *13*(7), e0200303. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200303>
- Bethlehem, J. (2010). Selection bias in web surveys. *International Statistical Review*, *78*(2), 161-188. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x>
- Biemer, P. P. (2010). Total Survey Error: Design, Implementation, and Evaluation. *Public Opinion Quarterly*, *74*(5), 817-848. <https://doi.org/10.1093/poq/nfq058>
- Committee on Reproducibility and Replicability in Science, Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences, Committee on National Statistics, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Nuclear and Radiation Studies Board, Division on Earth and Life Studies, ... National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *Reproducibility and Replicability in Science*. Washington, D.C.: National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25303>
- Dalton, D. R., Aguinis, H., Dalton, C. M., Bosco, F. A., & Pierce, C. A. (2012). Revisiting the File Drawer Problem in Meta-Analysis: An Assessment of Published and Nonpublished correlation Matrices. *Personnel Psychology*, *65*(2), 221-249. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2012.01243.x>
- Davis, N. (2017). The Goldwater rule: Why commenting on mental health from a distance is unhelpful. *The Guardian*.
- Deming, W. Edward. "On Errors in Surveys," *American Sociological Review* 9 (1944), pp. 359-369.
- Dienes, Z. (2008). *Understanding psychology as a science*. London: Palgrave Macmillan.
- Donsbach, W. (2015). Public Opinion Polls. In G. Mazzoleni (Ed.), *The International Encyclopedia of Political Communication*. New York: Wiley-Blackwell.

- Duckitt, J. (2001). *A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice*. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 33 (p. 41–113). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(01\)80004-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(01)80004-6)
- Erişen, C., Erişen, E., & Özkeçeci-Taner, B. (2013). Research Methods in Political Psychology. *Turkish Studies*, 14(1), 13–33. <https://doi.org/10.1080/14683849.2013.766979>
- Fealy, G. (2014). Resurgent political Islam, or astute Islamic parties? *New Mandala*.
- Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods* (Fifth edition). Los Angeles: SAGE.
- and Personality Science*, 7(7), 623–630. <https://doi.org/10.1177/1948550616652209>
- Gaines, B., Kuklinski, J., & Quirk, P. (2007). The Logic of the Survey Experiment Reexamined. *Political Analysis*, 15(1), 1–20. doi:10.1093/pan/mpi008
- Gawronski, B., Galdi, S., & Arcuri, L. (2015). What Can Political Psychology Learn from Implicit Measures? Empirical Evidence and New Directions: Implicit Measures in Political Psychology. *Political Psychology*, 36(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/pops.12094>
- Giorgi, A. (2012). The descriptive phenomenological psychological method. *Journal of Phenomenological Psychology*, 43(1), 3–12. <https://doi.org/10.1163/156916212X632934>
- Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total Survey Error: Past, Present, and Future. *Public Opinion Quarterly*, 74(5), 849–879. <https://doi.org/10.1093/poq/nfq065>
- Hendry, L. B., Mayer, P., & Kloep, M. (2007). Belonging or Opposing? A Grounded Theory Approach to Young People's Cultural Identity in a Majority/Minority Societal Context. *Identity*, 7(3), 181–204. <https://doi.org/10.1080/15283480709336930>
- Hidayat, R. (2018). Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan. *tirto.id*. <https://tirto.id/rawan-kepentingan-campur-aduk-lembaga-survei-jasa-konsultan-cjKL>.
- HIMPSI. (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia* (Pertama (Kongres XI HIMPSI 2010)). Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
- Intan, G. (2019). Dituduh Tukang Bohong, Lembaga Survei Ungkap Data dan Metodologi Quick Count. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-tukang-bohong-lembaga-survei-ungkap-data-dan-metodologi-quick-count/4885243.html>.
- Ioannidis, J. P. A. (2018). Meta-research: Why research on research matters. *PLOS Biology*, 16(3), e2005468. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005468>.
- Isani, M., & Silverman, D. (2016). Foreign Policy Attitudes toward Islamic Actors: An Experimental Approach. *Political Research Quarterly*, 69(3), 571–582. <https://doi.org/10.1177/1065912916654988>

- Israel, H., & Richter, R. R. (2011). A Guide to Understanding Meta-analysis. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 41(7), 496–504. <https://doi.org/10.2519/jospt.2011.3333>
- John, L. K., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2012). Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices With Incentives for Truth Telling. *Psychological Science*, 23(5), 524–532. <https://doi.org/10.1177/0956797611430953>
- Jost, J. T. (2019). The IAT Is Dead, Long Live the IAT: Context-Sensitive Measures of Implicit Attitudes Are Indispensable to Social and Political Psychology. *Current Directions in Psychological Science*, 28(1), 10–19. <https://doi.org/10.1177/0963721418797309>
- Kaarbo, J., & Beasley, R. K. (1999). A Practical Guide to the Comparative Case Study Method in Political Psychology. *Political Psychology*, 20(2), 369–391.
- Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic review. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 96(3), 118–121. <https://doi.org/10.1258/jrsm.96.3.118>
- Lilienfeld, S. O., Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2018). The Goldwater Rule: Perspectives From, and Implications for, Psychological Science. *Perspectives on Psychological Science*, 13(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1745691617727864>
- McAdams, D. P., Albaugh, M., Farber, E., Daniels, J., Logan, R. L., & Olson, B. (2008). Family metaphors and moral intuitions: How conservatives and liberals narrate their lives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 95(4), 978–990. <https://doi.org/10.1037/a0012650>
- McNally, R. J. (2018). Diagnosing at a Distance: Is the Goldwater Rule Still Relevant Today? *Perspectives on Psychological Science*, 13(1), 28–30. <https://doi.org/10.1177/1745691617731636>
- Mietzner, M. (2009). Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia: Catalyst or obstacle to democratic consolidation? *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 165(1), 95–126. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003644>
- Morling, B. (2018). *Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information* (3rd ed.). New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc.
- Mullinix, K. J., Leeper, T. J., Druckman, J. N., & Freese, J. (2015). The generalizability of survey experiments. *Journal of Experimental Political Science*, 2(2), 109–138. <https://doi.org/10.1017/XPS.2015.19>
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2017(15), 201708274. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>
- Parackal, M., Mather, D., & Holdsworth, D. (2018). Value-based prediction of election results using natural language processing: A case of the New

- Zealand General Election. *International Journal of Market Research*, 60(2), 156–168. <https://doi.org/10.1177/1470785318762234>
- Perezgonzalez, J. D. (2015). Fisher, Neyman-Pearson or NHST? A tutorial for teaching data testing. *Frontiers in Psychology*, 6(MAR), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00223>
- Peters, J. L., Sutton, A. J., Jones, D. R., Abrams, K. R., & Rushton, L. (2008). Contour-enhanced meta-analysis funnel plots help distinguish publication bias from other causes of asymmetry. *Journal of Clinical Epidemiology*, 61(10), 991–996. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.11.010>
- Price, P. C., Jhangiani, R. S., Chiang, I.-C. A., Leighton, D. C., & Cuttler, C. (2017). *Research Methods in Psychology* (3rd ed.). Pullman: Washington State University.
- Quintana, D. (2019). Synthetic datasets: A non-technical primer for the behavioural sciences to promote reproducibility and hypothesis-generation. <https://doi.org/10.31234/osf.io/dmfb3>
- Rheault, L., Beelen, K., Cochrane, C., & Hirst, G. (2016). Measuring Emotion in Parliamentary Debates with Automated Textual Analysis. *PLOS ONE*, 11(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168843>
- Rodgers, M. A., & Pustejovsky, J. E. (2019). *Evaluating Meta-Analytic Methods to Detect Selective Reporting in the Presence of Dependent Effect Sizes* (Preprint). MetaArXiv. <https://doi.org/10.31222/osf.io/vqp8u>
- Rothstein, H., Sutton, A. J., & Borenstein, M. (Eds.). (2005). *Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments*. Chichester, England ; Hoboken, NJ: Wiley.
- Social Work Research*, 27(2), 94–104. <https://doi.org/10.1093/swr/27.2.94>
- Ruel, E. E., Wagner, W. E., & Gillespie, B. J. (2016). *The practice of survey research: Theory and applications*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research. *PLOS Computational Biology*, 9(10), e1003285. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>
- Schafer, M. (2000). Issues in Assessing Psychological Characteristics at a Distance: An Introduction to the Symposium. *Political Psychology*, 21(3), 511–527. <https://doi.org/10.1111/0162-895X.00201>
- Schoonvelde, M., Schumacher, G., & Bakker, B. N. (2019). Friends With Text as Data Benefits: Assessing and Extending the Use of Automated Text Analysis in Political Science and Political Psychology. *Journal of Social and Political Psychology*, 7(1), 124–143–143. <https://doi.org/10.5964/jspp.v7i1.964>
- Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). *Research methods in psychology* (9th ed). New York, NY: McGraw-Hill.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting

- Anything as Significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366. <https://doi.org/10.1177/0956797611417632>
- Simonsohn, U., Nelson, L. D., & Simmons, J. P. (2014). P-Curve and Effect Size: Correcting for Publication Bias Using Only Significant Results. *Perspectives on Psychological Science*, 9(6), 666–681. <https://doi.org/10.1177/1745691614553988>
- Soderborg, S. (2019). Indonesia: How the polls are performing. *New Mandala*.
- Spellman, B., Gilbert, E. A., & Corker, K. S. (2017). *Open Science: What, Why, and How* (Preprint). PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/ak6jr>
- Stone, S., Johnson, K. M., Beall, E., Meindl, P., Smith, B., & Graham, J. (2014). Political psychology. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 5(4), 373–385. <https://doi.org/10.1002/wcs.1293>
- Symonds, J. E., & Gorard, S. (2010). Death of mixed methods? Or the rebirth of research as a craft. *Evaluation & Research in Education*, 23(2), 121–136. <https://doi.org/10.1080/09500790.2010.483514>
- Tijdkink, J. K., Verbeke, R., & Smulders, Y. M. (2014). Publication pressure and scientific misconduct in medical scientists. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 9(5), 64–71. <https://doi.org/10.1177/1556264614552421>
- van Aert, R. C. M. (2019). Meta-analysis and publication bias. Rotterdam, Netherlands.
- Veldkamp, C. L. S., Bakker, M., van Assen, M. A. L. M., Crompvoets, E. A. V., Ong, H. H., Nosek, B. A., ... Wicherts, J. M. (2018). *Ensuring the quality and specificity of preregistrations* (Preprint). PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/cdgyh>
- Wampold, B. E., Ahn, H., & Kim, D. (2000). Meta-analysis in the social sciences: *Asia Pacific Education Review*, 1(1), 67–74. <https://doi.org/10.1007/BF03026147>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Yong, E. (2018). Psychology's Replication Crisis Is Running Out of Excuses. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/11/psychologys-replication-crisis-real/576223/>.

Buku ini merupakan buku Psikologi Politik pertama berbahasa Indonesia yang hadir untuk ikut memperkaya khazanah pembahasan perilaku politik di Tanah Air. Jika pada umumnya analisis perilaku politik di Indonesia lebih banyak dilihat dari perspektif makro, seperti sistem politik dan partai politik, buku ini menghadirkan pembahasan dari sudut pandang mikro. Mencakup pembahasan tentang peran kepribadian, kognisi, afeksi, emosi, dan sikap pada masyarakat awam maupun elite politik dalam berbagai konteks politik (kepemimpinan politik, pemilihan umum, konflik antarkelompok, dan terorisme). Ditulis oleh sederet ilmuwan psikologi sosial yang tergabung dalam Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI, buku ini terbit dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca tentang tema dan konsep utama dalam psikologi. Seluruh bab di dalam buku ini ditulis dengan nuansa keindonesiaan yang kuat. Oleh karena itu, pembaca nantinya tidak hanya menemukan teori dan konsep psikologi politik yang bersifat abstrak dan general, tetapi juga dapat mempelajari bagaimana temuan empiris dan penerapannya dalam konteks politik di Indonesia.

Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPSI menyambut baik dan sangat bergembira atas terbitnya buku tentang psikologi politik oleh Ikatan Psikologi Sosial (IPS)-HIMPSI. Kegembiraan saya disebabkan buku ini mengupas bagaimana teori-teori psikologi politik bisa dipakai untuk menganalisis gejala-gejala politik di Indonesia. Pemerintah, akademisi, politisi, dan kelompok masyarakat lainnya mulai merasakan kebutuhan kehadiran psikologi politik. Saya berharap buku ini menjadi embrio lahirnya konsep dan teori psikologi politik Indonesia dan menjadi energi bagi para peneliti untuk lebih banyak melakukan riset psikologi politik.

Prof. Dr. Seger Handoyo—Psikolog, Ketua Umum PP HIMPSI
(Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia)

Dengan 14 bab yang mencakup ragam topik yang menjadi intisari pembahasan dalam psikologi politik, buku ini bukan hanya berhasil dalam menyajikan penelitian-penelitian orisinal yang kaya teori dan data yang menarik dalam konteks Indonesia, melainkan juga sukses dalam menetapkan agenda riset untuk generasi berikutnya. Ditulis oleh sejumlah ahli psikologi politik muda yang cemerlang, buku ini mampu mengisi kekosongan pustaka mengenai psikologi politik dalam bahasa Indonesia.

Burhanuddin Muhtadi M.A., Ph.D—Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah

Studi ilmu politik di Indonesia berkembang pesat terutama setelah demokratisasi karena suara individu/publik menjadi faktor penting untuk dimenangkan dalam dinamika politik. Bila sebelumnya generasi baru ekonom membawa insight ekonomi dalam kajian politik, misalnya untuk memahami perilaku pemilih, maka buku yang berada di tangan Anda ini berisi insights dari generasi baru akademisi dari disiplin ilmu psikologi yang dengan tekun dan tertib menguraikan teori dan metodologi dalam mengidentifikasi mekanisme psikologis untuk memahami perilaku dan kontestasi politik serta dinamika sosial lain.

Philips Vermonte, Ph.D—Direktur Eksekutif CSIS, Ketua Umum Persepi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia)

Buku ini memberikan pengantar penting mengenai persimpangan antara psikologi dan politik, dan diterbitkan tepat pada masa meningkatnya identitas politik dan populisme di negara demokrasi berkembang maupun mapan. Rangkaian tulisan, dengan menyentuh kasus dan fenomena berbeda, secara mendasar menunjukkan bahwa peta mental individu berinteraksi secara dinamis dengan situasi sosial politik yang lebih luas—sebuah koneksi yang terlalu sering diabaikan dalam literatur psikologi di Indonesia dan dunia.

Dr. Inaya Rakhmani—Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI,
Ketua Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI


KOMPAS
PENERBIT BUKU
Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 | Telp. (021) 5347710 ext. 85225
@buku@kompas.com
@bukuKOMPAS
Penerbit Buku Kompas

SOCIAL SCIENCE



582012327

Harga P Jawa Rp 199.000



9 780201 379624

ISBN 978-623-241-639-0
ISBN 978-623-241-640-6 (PDF)